



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 86 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Semarang, maka perlu disusun perencanaan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Semarang Tahun 2018-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018-2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Semarang Tahun 2018-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB 1 : Pendahuluan;
- b. BAB 2 : Profil Anak Kabupaten Semarang;
- c. BAB 3 : Arah Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Semarang;
- d. BAB 4 : Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Semarang; dan
- e. BAB 5 : Penutup.

Pasal 4

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang memuat langkah-langkah strategis dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak secara menyeluruh dan berkelanjutan di Kabupaten Semarang.

Pasal 5

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana kerja untuk mewujudkan pemenuhan hak anak di Daerah.

Pasal 6

- (1) Pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Semarang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat dapat berkontribusi dalam pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak.

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada kecamatan, desa dan kelurahan dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak yang meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 8

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak secara berkala tiap triwulan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 11-12-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 11-12-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 86

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

ttd.

WENNY MAYA KARTIKA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR **86** TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK
ANAK KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 -
2021

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 - 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa, yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun Negara dan Bangsa. Anak merupakan subjek dan objek pembangunan nasional Indonesia dalam usaha mencapai aspirasi Bangsa Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur spiritual dan material. Anak adalah modal pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan fisik mental dan sosial Indonesia.

Oleh sebab itu, setiap anak memerlukan perlindungan dan dalam hal ini kita telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan Undang-Undang tersebut maka Negara menjamin hak-hak anak yaitu memiliki tingkat kebebasan yang optimal, memperoleh pendidikan, mendapatkan perlindungan dan kesempatan berpartisipasi. Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

Salah satu bentuk nyata upaya pemerintah dalam perlindungan anak adalah diwujudkan melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) sesuai yang tertuang pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu Kabupaten yang menjamin hak setiap anak sebagai warga Kabupaten. Tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Semarang juga mendukung dan mensukseskan program ini. KLA merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada

Tahun 2005 melalui Kebijakan KLA. Tahun 2006 konsep KLA diujicobakan. Kabupaten Semarang memang belum masuk dalam Kabupaten/Kota yang menjadi objek percontohan dalam keberhasilan Kabupaten Layak Anak (KLA) namun dari keseluruhan program kegiatan pembangunan sudah mengakomodir dalam mendukung tumbuh kembang anak atau dengan istilah lain yaitu pembangunan sudah mengarah pada pro anak.

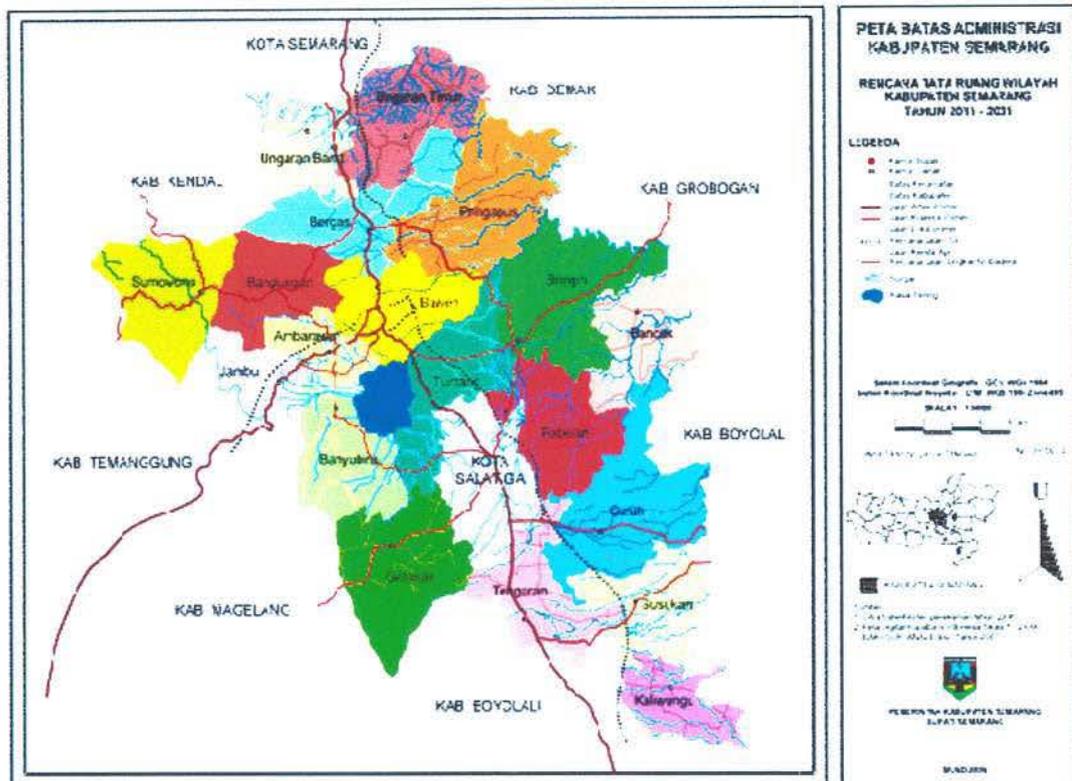
1.2.Kondisi Umum Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Ungaran. Batas administrasi Kabupaten Semarang adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kota Semarang, dan Kabupaten Demak. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Grobogan. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal. Ditengah-tengah wilayah ini terdapat Kota Salatiga. Rata-rata ketinggian tempat di Kabupaten Semarang adalah 607 meter di atas permukaan laut. Daerah terendah yaitu di Desa Candirejo Kecamatan Ungaran, sedangkan daerah tertinggi adalah di Desa Batur Kecamatan Getasan.

Kabupaten Semarang dilintasi jalan negara yang menghubungkan Yogyakarta dan Surakarta dengan Kota Semarang atau lebih dikenal dengan "JOGLO SEMAR". Angkutan umum antarkota dilayani dengan bus, yakni di terminal bus Sisemut (Ungaran), Bawen, dan Ambarawa. Beberapa rute angkutan regional adalah: Semarang-Solo, Semarang-Yogyakarta, dan Semarang-Purwokerto, sedang rute angkutan lokal adalah Semarang-Ambarawa dan Semarang-Salatiga, Salatiga - Ambarawa.

Bawen merupakan kota persimpangan jalur menuju Solo dan menuju Yogyakarta atau Purwokerto. Jalur kereta api Semarang-Yogyakarta merupakan salah satu yang tertua di Indonesia, namun saat ini tidak lagi dioperasikan, sejak meletusnya Gunung Merapi yang merusakkan sebagian jalur tersebut. Jalur lain yang kini juga tidak beroperasi adalah Ambarawa-Tuntang-Kedungjati.

Kondisi administratif Kabupaten Semarang dapat dijelaskan pada peta administratif sebagai berikut:

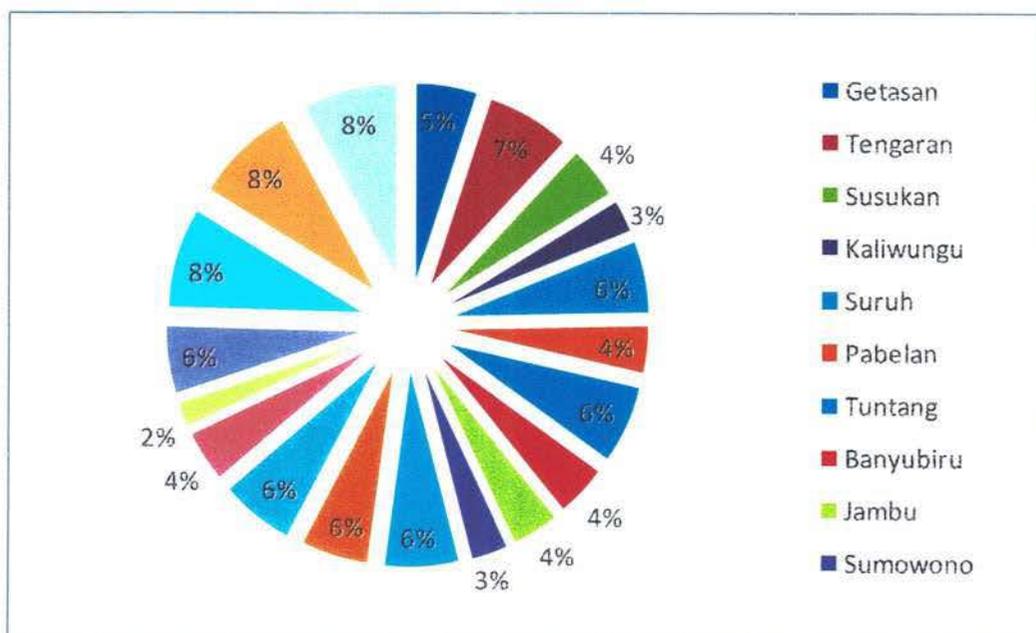


Sumber : Barenlitbangda Kabupaten Semarang, 2017

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Semarang

Penduduk Kabupaten Semarang pada Tahun 2017 diperkirakan mencapai 1.027.489 jiwa, jumlah ini meningkat 13.291 jiwa atau 1,29% dibanding tahun 2016. Jumlah penduduk Kabupaten Semarang pada Tahun 2016 sebanyak 1.014.198 jiwa.

Dilihat dari sisi persebaran per kecamatan pada Tahun 2017, terlihat bahwa penduduk tersebar hampir merata di semua kecamatan. Penduduk paling banyak berada di Kecamatan Ungaran Barat (2.379 orang/km²), Kecamatan Ambarawa (2.379 orang/km²), dan Kecamatan Ungaran Timur (2.162 orang/km²). Data sebaran penduduk selengkapnya disajikan dalam gambar 1.2. berikut :



Gambar 1.2
Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2017

Perkembangan jumlah penduduk dan sebaran penduduk per kecamatan di Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017, selengkapnya tersaji pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013-2017 (Jiwa)

No	Kecamatan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Getasan	29.400	49.823	50.227	50.625	51.029
2.	Tengaran	67.336	68.326	69.301	70.273	71.254
3.	Susukan	43.653	43.771	43.869	43.995	44.013
4.	Kaliwungu	26.517	26.558	26.588	26.614	26.650
5.	Suruh	60.074	60.168	60.235	60.286	60.409
6.	Pabelan	38.464	38.816	39.153	39.486	39.790
7.	Tuntang	62.797	63.549	64.280	65.008	65.865
8.	Banyubiru	41.531	41.927	42.308	42.681	43.105
9.	Jambu	37.793	38.165	38.523	38.876	39.248
10.	Sumowono	30.213	30.361	30.496	30.625	30.792
11.	Ambarawa	60.282	60.881	61.459	62.025	62.651
12.	Bandungan	54.695	55.366	56.020	56.667	57.229

No	Kecamatan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
13.	Bawen	57.607	58.815	60.021	61.240	62.231
14.	Bringin	41.990	42.277	42.546	42.804	43.069
15.	Bancak	20.134	20.166	20.205	20.205	20.094
16.	Pringapus	53.316	55.363	54.452	56.452	57.344
17.	Bergas	75.117	77.503	82.412	82.412	85.022
18.	Ungaran Barat	79.053	80.659	83.875	83.875	85.557
19.	Ungaran Timur	74.143	76.103	80.089	80.089	82.137
Jumlah		974.115	987.597	1.000.887	1.014.198	1.027.489

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2014 -2017

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa persentase laju pertumbuhan penduduk secara keseluruhan antara Tahun 2010 sampai dengan 2016 adalah 8,74 persen.

Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Ungaran Barat, sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Bancak. Hal ini terjadi karena penduduk di Kabupaten Semarang cenderung terkonsentrasi di kawasan strategis cepat tumbuh. Kawasan tersebut adalah Kecamatan Ungaran, Bergas, Bawen. Kepadatan penduduk menurut kecamatan selengkapnya sebagaimana terlihat pada Tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013-2017

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Getasan	65,80	744	748	751	769	776
2	Tengaran	47,30	1367	1372	1379	1.486	1506
3	Susukan	48,87	888	888	890	899	901
4	Kaliwungu	29,95	881	882	884	889	890
5	Suruh	64,02	942	942	942	942	944
6	Pabelan	47,97	788	793	796	823	829
7	Tuntang	56,24	1098	1103	1112	1.156	1171
8	Banyubiru	54,41	751	755	759	784	792

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
			2013	2014	2015	2016	2017
9	Jambu	51,63	726	730	734	753	760
10	Sumowono	55,63	549	556	561	551	554
11	Ambarawa	28,22	2090	2097	2112	2.198	2220
12	Bandungan	48,23	1124	1132	1140	1175	1187
13	Bawen	46,57	1202	1223	1243	.315	1336
14	Bringin	61,89	668	672	675	692	696
15	Bancak	43,85	457	458	463	461	458
16	Pringapus	78,35	653	657	661	721	732
17	Bergas	47,33	1483	1497	1509	1.741	1796
18	Ungaran Barat	35,96	2119	2140	2162	2.332	2379
19	Ungaran Timur	37,99	1833	1836	1840	2.108	2162
Kabupaten		950,21	1000	1006	1012	1.067	1081

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2014-2017

Pada Tahun 2017, Kabupaten Semarang penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 91,56 %. Adapun penduduk usia non produktif Kabupaten Semarang adalah sebesar 8,44 % dari total penduduk. Semakin besar proporsi penduduk usia tidak produktif, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Komposisi jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 1.3. dibawah ini :

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Semarang Menurut Kelompok Umur
Tahun 2013 - 2017 (Jiwa)

Kelompok Umur	2013	2014	2015	2016	2017
0 - 14	227.100	228.461	229.873	234.423	234.515
15 - 64	611.318	653.785	657.912	696.556	706.241
65+	72.819	73.235	73.636	83.219	86.733

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2014-2017

Komposisi jumlah penduduk Kabupaten Semarang menurut jenis kelamin dan rasio seks Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 1.4 dibawah ini :

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Kabupaten Semarang
Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Seks Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Orang)			Sex Rasio
		L	P	L + P	
1	Getasan	25 127	25 902	51 029	97,01%
2	Tengaran	36 172	35 082	71 254	103,11%
3	Susukan	21 861	22 152	44 013	98,69%
4	Kaliwungu	12 863	13 787	26 650	93,30%
5	Suruh	29 909	30 500	60 409	98,06%
6	Pabelan	19 829	19 961	39 790	99,34%
7	Tuntang	32 392	33 473	65 865	96,77%
8	Banyubiru	21 545	21 560	43 105	99,93%
9	Jambu	19 420	19 828	39 248	97,94%
10	Sumowono	15 524	15 268	30 792	101,68%
11	Ambarawa	31 202	31 449	62 651	99,21%
12	Bandungan	28 692	28 537	57 229	100,54%
13	Bawen	30 649	31 582	62 231	97,05%
14	Bringin	21 234	21 835	43 069	97,25%
15	Bancak	9 795	10 299	20 094	95,11%
16	Pringapus	26 914	30 430	57 344	88,45%
17	Bergas	39 489	45 533	85 022	86,73%
18	Ungaran Barat	41 620	43 937	85 557	94,73%
19	Ungaran Timur	40 583	41 554	82 137	97,66%
Jumlah	2017	504 820	522 669	1 027 489	96,59%
	2016	498,324	515,874	1,014,198	96.60%
	2015	491,821	509,066	1,000,887	97.22%
	2014	485,259	502,338	987,597	97.25%
	2013	478,723	495,392	974,115	97.27%
	2012	472,022	488,475	960,497	97.21%
	2011	465,254	481,454	946,708	97.14%
	2010	458,196	474,506	932,702	97.00%

Sumber : Proyeksi Penduduk Berdasarkan Hasil SP 2010

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah yterakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 95, Tambahan Lembaran Negara No. 4419);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota/Kabupaten Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Panduan Evaluasi Kota/Kabupaten Layak Anak;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021;
22. Keputusan Bupati Semarang Nomor : 890/0078/2018 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Semarang.

BAB II

PROFIL ANAK KABUPATEN SEMARANG

2.1. Kondisi Obyektif Anak Kabupaten Semarang

2.1.1. Kependudukan

Pemerintah Kabupaten Semarang memiliki inovasi dalam memberikan layanan pembuatan Akta Kelahiran yang diberi nama ***Balaputradewa (Bayi Lahir Pulang Bawa Akta Kelahiran dengan Wajah Ceria)***. Program ini diinisiasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang pada tahun 2016 dimana implementasinya bekerjasama dengan RSUD Ambarawa dan Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang yang bertujuan mendorong kepemilikan Akta Kelahiran tiap bayi. Mekanismenya adalah tiap bayi yang baru lahir, khususnya di RSUD Ambarawa, akan langsung diproses pembuatan Akta Kelahirannya. Di tahun 2017, program ini terus dikembangkan dan bekerjasama dengan instansi lain diantaranya RSUD Ungaran, PT. Pos Indonesia dalam bentuk kerjasama pendistribusian Akta Kelahiran ke Kecamatan, sehingga warga pemohon Akta Kelahiran dapat mengambil Akta Kelahiran di Kecamatan, tidak perlu datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang.

Dengan berjalannya program tersebut, hingga saat ini jumlah anak di Kabupaten Semarang yang telah memiliki Akta Kelahiran mencapai lebih dari 93%. Untuk lebih jelasnya data terpilah jumlah anak di Kabupaten Semarang menurut jenis kelamin dan kecamatan yang tercatat dan memiliki Akta Kelahiran pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Data Anak yang Memiliki Akta Kelahiran
Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2018

NO	NAMA_KEC	LK	PR	TOTAL JUMLAH ANAK	JUMLAH ANAK MEMILIKI AKTA KELAHIRAN			PROSENTASE ANAK YANG MEMILIKI AKTA
					L	P	JUMLAH	
1	GETASAN	6.760	6.580	13.340	6.250	6.139	12.389	92,87
2	TENGARAN	9.477	8.924	18.401	8.893	8.377	17.270	93,85
3	SUSUKAN	6.625	6.219	12.844	6.118	5.755	11.873	92,44
4	SURUH	9.491	8.956	18.447	8.925	8.455	17.380	94,22
5	PABELAN	5.921	5.553	11.474	5.455	5.176	10.631	92,65
6	TUNTANG	9.165	8.634	17.799	8.558	8.057	16.615	93,35
7	BANYUBIRU	6.031	5.653	11.684	5.676	5.357	11.033	94,43
8	JAMBU	5.548	5.225	10.773	5.302	5.012	10.314	95,74
9	SUMOWONO	4.424	4.292	8.716	4.301	4.168	8.469	97,17
10	AMBARAWA	8.404	7.830	16.234	7.794	7.303	15.097	93,00
11	BAWEN	8.137	7.575	15.712	7.633	7.096	14.729	93,74
12	BRINGIN	6.332	5.873	12.205	5.772	5.421	11.193	91,71
13	BERGAS	9.976	9.343	19.319	9.259	8.663	17.922	92,77
15	PRINGAPUS	7.699	7.205	14.904	7.072	6.660	13.732	92,14
16	BANCAK	3.312	3.077	6.389	3.131	2.929	6.060	94,85
17	KALIWUNGU	3.783	3.665	7.448	3.265	3.173	6.438	86,44
18	UNGERAN BARAT	10.823	10.351	21.174	9.703	9.330	19.033	89,89
19	UNGERAN TIMUR	10.613	10.060	20.673	9.984	9.529	19.513	94,39
20	BANDUNGAN	8.150	7.732	15.882	7.906	7.514	15.420	97,09
	JUMLAH	140.671	132.747	273.418	130.997	124.114	255.111	93,30

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, 2018

Data anak terpilah menurut jenis kelamin dan kategori umur yang tercatat dan memiliki Akta Kelahiran pada tahun 2018 adalah :

Tabel 2.3
Data Anak yang Memiliki Akta Kelahiran
Menurut Jenis Kelamin dan Kategori Umur Tahun 2018

Kategori Umur	Jumlah Anak		Jumlah anak yang memiliki akta kelahiran		Prosentase anak yang memiliki akta kelahiran
	L	P	L	P	
0 – 4	22.909	21.768	22.532	21.420	98,38
5 – 9	41.671	39.278	40.408	38.084	96,96
10 - 14	39.969	37.344	34.702	32.447	86,85
15 - 18	40.866	38.670	25.087	23.946	61,65
Jumlah	145.415	137.060	122.729	115.897	84,48

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, 2018

2.1.2. Pendidikan

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

Peningkatan perluasan dan pemerataan pelayanan akses pendidikan diukur melalui capaian hasil (outcomes) berdasarkan pada peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pendidikan pada tahun-tahun pelajaran. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Semarang mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari data perkembangan APK PAUD Kabupaten Semarang Tahun 2012-2017 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Perkembangan APK PAUD Kabupaten Semarang
Tahun 2012 - 2017

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	PAUD						
1.1	Jumlah Siswa yang Bersekolah di PAUD	37.575	33.513	40.039	40.638	40.681	39.824
1.2	Jumlah Penduduk Usia 3-6 Tahun	47.953	49.827	50.770	51.375	51.687	50.799
1.3	APK PAUD	37,13	44,90	47,18	54,92	64,28	64,85

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Semarang, 2017

Dari data yang tersaji pada Tabel 2.4 di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah siswa yang bersekolah PAUD di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan tiap tahunnya, terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Namun pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan jumlah siswa yang bersekolah PAUD sebanyak 857 orang jika dibandingkan dengan jumlah siswa yang bersekolah PAUD pada tahun 2016.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Semarang mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari data perkembangan APK SD/MI/Paket A di Kabupaten Semarang Tahun 2012-2017 berikut :

Tabel 2.5
Perkembangan APK Jenjang Sekolah Dasar
Kabupaten Semarang Tahun 2012 - 2017

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI/Paket A						
1.1	Jumlah Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	98.698	97.277	97.252	97.818	98.202	99.118
1.2	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun	93.989	93.099	92.618	93.600	91.728	93.181
1.3	APK SD/MI/Paket A	105,01	105,02	105,00	104,51	107,06	106,37

Sumber : Dinas Pendidikan ,Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Semarang, 2017

Dari data yang tersaji pada Tabel 2.5 di atas dapat dilihat bahwa jumlah siswa yang bersekolah SD di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan tiap tahunnya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Namun pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan APK jumlah siswa yang bersekolah SD jika dibandingkan dengan APK tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat anak usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah SD/sederajat. Dari hasil pendataan Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah (usia 7-21 tahun) pada tahun 2017 diperoleh data sebanyak 1.190 orang anak tidak melanjutkan kembali sekolahnya dikarenakan beberapa faktor, diantaranya Faktor Internal (kurangnya kemauan pribadi anak, sudah bekerja, sudah menikah, kesehatan kurang) dan Faktor Eksternal (jauhnya jarak dan kondisi geografis, lingkungan tidak mendukung, kurang mampu secara ekonomi).

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Semarang juga mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari data perkembangan APK SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Semarang Tahun 2012-2017 sebagaimana Tabel 2.6 di bawah ini :

Tabel 2.6
Perkembangan APK Jenjang Sekolah Menengah Pertama
Kabupaten Semarang Tahun 2012 - 2017

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	SMP/MTs/Paket B						
1.1	Jumlah Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	42.811	43.382	43.709	44.072	43.510	43.392
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	44.649	45.213	45.531	45.776	44.610	42.417
1.3	APK SMP/MTs/Paket B	95,88	95,95	96,00	96,28	97,53	102,3

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Semarang, 2017

Dari data yang tersaji pada Tabel 2.6 di atas dapat dilihat bahwa jumlah siswa yang bersekolah SMP di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan tiap tahunnya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

Untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai menggunakan Angka Partisipasi Murni (APM). APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase, dengan nilai ideal 100%. Makin tinggi nilai APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di masing-masing jenjang pendidikan.

Perkembangan Angka Partisipasi Murni Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Semarang juga mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari data perkembangan APM di Kabupaten Semarang Tahun 2012-2017 sebagaimana Tabel 2.7 di bawah ini :

Tabel 2.7
Perkembangan APM Kabupaten Semarang
Tahun 2012 - 2017

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI/Paket A						
1.2	Jumlah Siswa Kelompok usia 7-12 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	68.548	72.294	69.808	69.796	67.399	67.449
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	84.260	90.584	90.394	91.644	92.483	93.181
1.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	95,05	95,09	95,15	95,16	95,18	93,02
2	SMP/MTs/Paket B						

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
2.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 13-15 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	31.488	28.594	28.202	28.549	25.825	25.078
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	42.154	42.899	42.950	43.772	43.372	42.417
2.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	81,70	81,75	81,80	81,81	81,85	75,02

Sumber : Dinas Pendidikan ,Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Semarang, 2017

Dari data yang tersaji pada Tabel 2.7 di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah APM siswa yang bersekolah baik jenjang Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Semarang cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Namun demikian, pada tahun 2017 mengalami penurunan APM baik di jenjang SD maupun SMP. Hal ini menunjukkan bahwa untuk APM belum mencapai apa yang telah ditargetkan dikarenakan adanya preferensi untuk melanjutkan pendidikan ke daerah Kabupaten/Kota lainnya.

Disamping itu pada tahun 2017 terjadi perubahan metode perhitungan APM yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun-tahun sebelumnya penghitungan APM dilakukan menggunakan Laporan Individu Sekolah dengan teknik pembulatan ke atas untuk usia 6 tahun 6 bulan sampai dengan 6 tahun 11 bulan untuk SD dan usia 12 tahun 6 bulan sampai dengan 12 tahun 11 bulan untuk SMP, sehingga jumlah siswa untuk pembilang lebih banyak. Mulai tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan metode perhitungan APM yang baru dimana penghitungan APM dilakukan dengan menggunakan data dapodik yang tidak menerapkan sistem pembulatan usia siswa.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya Angka Partisipasi Sekolah pada setiap kelompok umur. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Semarang dapat dilihat dari data perkembangan APM di Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017 sebagaimana Tabel 2.8 di bawah ini :

Tabel 2.8
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah
Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
SD/ MI (7 – 12 th)	100	100	99,21	100	100
SMP/ MTs (13 – 15 th)	95,08	96,89	97,58	95,65	95,65
SMA/SMK/MA (16-18 th)	56,10	61,34	59,72	71,09	73,34

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2017

Dari data yang tersaji pada Tabel 2.8 di atas dapat disimpulkan bahwa capaian APS penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Semarang selalu tercapai 100% tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa peluang penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Semarang untuk dapat bersekolah SD/MI adalah sebesar 100%. Adapun capaian APS penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Semarang rata-rata mencapai lebih dari 95%, yang bermakna bahwa peluang penduduk Kabupaten Semarang usia 13-15 tahun untuk dapat bersekolah jenjang SMP/MTs adalah sebesar 95%.

Tabel 2.9
Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru
Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan
di Kabupaten Semarang Th. Ajaran 2016 / 2017

Kecamatan	Banyaknya						Rasio Murid Guru
	Sekolah		Murid		Guru		
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
Getasan	24	4	3,217	750	256	59	13
Tengaran	32	2	4,386	849	341	60	13
Susukan	29		2,864		272		11
Kaliwungu	25	1	2,074	162	246	11	9
Suruh	35	2	3,942	581	341	33	12
Pabelan	24		2,459		229		11
Tuntang	30		3,955		322		12
Banyubiru	24		3,01		218		14
Jambu	19	1	2,407	162	196	7	13
Sumowono	26		2,662		234		11
Ambarawa	23	7	4,108	1,54	239	80	18
Bandungan	21	3	3,283	519	225	36	15
Bawen	21	4	3,779	1,379	222	78	17
Bringin	26		3,179		254		13
Bancak	12		1,522		124		12
Pringapus	25		4,753		253		19
Bergas	28	2	5,325	736	280	45	19
Ungaran Barat	28	9	5,755	2,449	310	152	18
Ungaran Timur	21	1	4,618	438	235	19	20

2016 / 2017	473	36	67,298	9,565	4,797	580	14
2015 / 2016	475	36	68,37	9,222	4,827	554	14
2014 / 2015	493	36	69,097	8,878	4,845	526	15
2013 / 2014	494	36	70,404	8,524	4,93	531	14
2012 / 2013	495	36	72,078	8,237	5,023	516	14
2011 / 2012	497	34	73,394	7,903	4,607	464	16
2010 / 2011	499	34	74,439	7,669	4,665	420	16

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Semarang, 2017

Tabel 2.10
Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan
di Kabupaten Semarang Th. Ajaran 2016 / 2017

Kecamatan	Banyaknya						Rasio Murid Guru
	Sekolah		Murid		Guru		
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
Getasan	3	2	1,285	196	79	22	15
Tengaran	4	2	2,327	724	141	58	15
Susukan	2	3	864	640	56	52	14
Kaliwungu	2	1	991	30	56	12	15
Suruh	3	4	1,736	471	92	56	15
Pabelan	3		1,315		82		16
Tuntang	3	2	1,245	187	76	22	15
Banyubiru	3	2	1,178	247	65	22	16
Jambu	2	2	816	198	51	21	14
Sumowono	2	2	929	289	48	26	16
Ambarawa	6	6	3,254	1,673	167	107	18
Bandungan	2	2	759	217	39	35	13
Bawen	2	2	1,424	222	61	23	20
Bringin	3	1	1,599	12	85	7	18
Bancak	1	1	319	195	18	16	15
Pringapus	3	1	1,363	30	73	11	17
Bergas	1	3	833	318	39	36	15
Ungaran Barat	3	7	2,03	1,161	98	114	15
Ungaran Timur	3	2	2,385	226	110	28	19

2016 / 2017	51	45	26,652	7,036	1,436	668	16
2015 / 2016	51	45	26,792	7,344	1,449	624	16
2014 / 2015	51	42	26,659	7,127	1,446	602	16
2013 / 2014	51	42	26,41	6,92	1,446	583	16
2012 / 2013	51	41	26,119	6,638	1,446	580	16
2011 / 2012	51	42	25,915	6,584	1,399	543	17
2010 / 2011	51	42	26,054	7,149	1,427	567	17

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Semarang, 2017

Tabel 2.11
Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru
Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Kecamatan
di Kabupaten Semarang Th. Ajaran 2016 / 2017

Kecamatan	Banyaknya						Rasio Murid Guru
	Sekolah		Murid		Guru		
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
Getasan	1		227		27		8
Tengaran	1		1,04		69		15
Susukan	1	3	166	391	22	55	7
Kaliwungu		1		54		20	3
Suruh	1		335		32		10
Pabelan	1		326		30		11
Tuntang	1		648		37		18
Banyubiru		1		399		31	13
Jambu		1		345		19	18
Sumowono		1		68		12	6
Ambarawa	1	3	1,006	1,098	62	59	17
Bandungan		1		215		16	13
Bawen		1		279		21	13
Bringin	1	1	717	50	42	13	14
Bancak							
Pringapus							
Bergas	1		1,091		51		21
Ungaran Barat	1	1	1,175	31	60	8	18
Ungaran Timur	1		1,18		64		18

2015 / 2016	11	14	7,911	2,93	496	254	14
2015 / 2016	11	14	7,395	2,668	492	238	14
2014 / 2015	11	14	6,796	2,405	472	252	13
2013 / 2014	11	14	6,416	2,335	442	223	13
2012 / 2013	11	14	6,39	2,515	473	222	13
2011 / 2012	11	14	6,383	2,512	466	219	13

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Semarang, 2017

Tabel 2.12
Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Kecamatan
di Kabupaten Semarang Th. Ajaran 2016 / 2017

Kecamatan	Banyaknya						Rasio Murid Guru
	Sekolah		Murid		Guru		
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
Getasan		1		267		25	11
Tengaran	1	2	1,743	999	100	78	15
Susukan		4		644		86	7
Kaliwungu	1	1	1,195	62	65	16	16
Suruh		2		923		63	15
Pabelan	1	1	468	74	28	10	14
Tuntang	1		78		7		
Banyubiru		1		131		21	6
Jambu	1		1,008		55		18
Sumowono		1		138		24	6
Ambarawa		5		1,019		107	10
Bandungan		2		139		23	6
Bawen	1		1,96		92		21
Bringin		2		111		27	4
Bancak	1		1,14		62		18
Pringapus	1		950		46		21
Bergas		1		233		23	10
Ungaran Barat	1	11	386	3,89	28	281	14
Ungaran Timur		1		134		20	7
2016 / 2017	9	35	8,928	8,764	483	804	14
2015 / 2016	9	35	8,277	8,568	461	743	14
2014 / 2015	8	31	7,591	8,047	434	693	14
2013 / 2014	8	30	6,876	8,286	376	646	15
2012 / 2013	8	28	6,234	8,038	342	580	15
2011 / 2012	8	26	5,56	7,596	345	592	14

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Semarang, 2017

Tabel 2.13
Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru
Madrasah Tsanawiyah (MTs) Menurut Kecamatan
di Kabupaten Semarang Th. Ajaran 2016 / 2017

Kecamatan	Banyaknya						Rasio Murid Guru
	Sekolah		Murid		Guru		
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
010 Getasan	-	2	-	444	-	33	13
020 Tengaran	-	3	-	1,059	-	73	15
030 Susukan	1	2	938	344	52	32	15
031 Kaliwungu	-	1	-	52	-	10	5
040 Suruh	-	1	-	263	-	16	16
050 Pabelan	-	3	-	341	-	42	8
060 Turtang	-	-	-	-	-	-	-
070 Banyubiru	-	2	-	223	-	26	9
080 Jambu	-	2	-	108	-	25	4
090 Sumowono	-	2	-	365	-	28	13
100 Aribarawa	-	1	-	101	-	14	7
101 Bandungan	-	5	-	1,093	-	78	14
110 Bawen	-	-	-	-	-	-	-
120 Bringin	-	3	-	318	-	37	9
121 Bancak	-	1	-	85	-	10	9
130 Pringapus	-	2	-	225	-	34	7
140 Bergas	-	2	-	757	-	46	16
151 Ungaran Barat	-	4	-	1,185	-	75	16
152 Ungaran Timur	-	4	-	582	-	61	10
2016 / 2017	1	40	938	7,545	52	640	12
2015 / 2016	1	39	935	7,446	54	598	13
2014 / 2015	1	39	926	7,461	53	588	13
2013 / 2014	1	39	895	7,317	51	595	13
2012 / 2013	1	39	807	6,910	51	585	12
2011 / 2012	1	38	759	6,516	47	531	13
2010 / 2011	1	37	748	6,738	49	513	13

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Semarang, 2017

Tabel 2.14
Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Madrasah
Ibtidaiyah (MI) Menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang Th. Ajaran
2016 / 2017

Kecamatan	Banyaknya						Rasio Murid Guru
	Sekolah		Murid		Guru		
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
010 Getasan	0	4	0	545	0	35	16
020 Tengaran	0	16	0	1,881	0	143	13
030 Susukan	2	11	471	1,243	37	97	13
031 Kaliwungu	0	2	0	189	0	14	14
040 Suruh	0	21	0	2,003	0	167	12
050 Pabelan	0	15	0	1,594	0	127	13
060 Turtang	0	9	0	1,239	0	77	16
070 Banyubiru	0	6	0	963	0	52	19
080 Jambu	1	7	302	719	18	53	14
090 Sumowono	0	3	0	324	0	25	13
100 Ambarawa	1	5	552	486	22	42	16
101 Bandungan	0	11	0	1,886	0	93	20
110 Bawen	1	3	232	230	17	22	12
120 Bringin	1	12	104	1,180	12	94	12
121 Bancak	0	7	0	716	0	51	14
130 Pringapus	0	4	0	433	0	29	15
140 Bergas	0	6	0	954	0	59	16
151 Ungaran Barat	0	8	0	1,216	0	83	15
152 Ungaran Timur	0	7	0	1,500	0	72	21
2016 / 2017	6	157	1,661	19,301	106	1,335	15
2015 / 2016	6	157	1,538	18,262	100	1,314	14
2014 / 2015	6	156	1,460	17,354	101	1,314	13
2013 / 2014	6	155	1,425	16,843	104	1,336	13
2012 / 2013	6	155	1,365	16,474	107	1,354	12
2011 / 2012	6	155	1,314	16,339	97	1,176	14
2010 / 2011	6	158	1,270	15,453	73	1,144	14

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Semarang

Tabel 2.15
Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Madrasah Aliyah (MA) Menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang Th. Ajaran 2016 / 2017

Kecamatan	Banyaknya						Rasio Murid Guru
	Sekolah		Murid		Guru		
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
010 Getasan	-	-	-	-	-	-	-
020 Tengaran	1	3	482	948	33	82	12
030 Susukan	-	1	-	57	-	8	57
031 Kaliwungu	-	-	-	-	-	-	-
040 Suruh	1	-	614	-	40	-	15
050 Pabelan	-	-	-	-	-	-	-
060 Tuntang	-	-	-	-	-	-	-
070 Banyubiru	-	-	-	-	-	-	-
080 Jambu	-	-	-	-	-	-	-
090 Sumowono	-	-	-	-	-	-	-
100 Ambarawa	-	-	-	-	-	-	-
101 Bandungan	-	2	-	394	-	33	12
110 Bawen	-	-	-	-	-	-	-
120 Bringin	-	-	-	-	-	-	-
121 Bancak	-	-	-	-	-	-	-
130 Pringapus	-	2	-	177	-	28	6
140 Bergas	-	-	-	-	-	-	-
151 Ungaran Barat	-	-	-	-	-	-	-
152 Ungaran Timur	-	-	-	-	-	-	-
2016 / 2017	2	8	1,096	1,576	73	151	12
2015 / 2016	2	8	968	1,456	70	131	12
2014 / 2015	2	6	797	1,174	58	97	13
2013 / 2014	2	6	732	1,076	58	84	13
2012 / 2013	2	5	658	922	63	77	11
2011 / 2012	2	5	591	761	57	73	10

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Semarang

2.1.3. Kesehatan

Data terkait kesehatan anak-anak di Kabupaten Semarang sebagai berikut :

Tabel 2.16
Data Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi

No	Uraian	Jumlah						Keterangan
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1.	Kematian bayi	105	89	96	89	76	93	
2.	Kelahiran hidup	14141	13859	14127	13541	12796	13589	

Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Semarang.

Tabel 2.17
Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk, Gizi Kurang,
Stunting dan Gizi Lebih 2018

No	Kecamatan	Gizi Kurang			Gizi Buruk			Stunting			Gizi Lebih		
		L	P	T	L	P	T	L	P	T	L	P	T
1	Getasan	134	158	292	0	0	0	172	125	297	28	111	139
2	Tengaran	111	132	243	5	4	9	112	146	258	11	14	25
3	Susukan	90	71	161		1	1	27	28	55	10	7	17
4	Kaliwungu	74	61	135			0	59	67	126	23	27	50
5	Suruh	72	91	163	6	3	9	74	83	157	33	21	54
6	Pabelan	126	106	232	1	0	1	212	151	363	32	21	53
7	Tuntang	86	71	157	0	0	0	201	192	393	58	53	111
8	Banyubiru	16	30	46	1		1	35	50	85	5	2	7
9	Jambu	91	79	170			0	284	258	542	41	21	62
10	Sumowono	100	82	182	2	2	4	230	278	508	20	17	37
11	Ambarawa	52	47	99	1		1	63	58	121	50	39	89
12	Duren	132	129	261	1	0	1	84	83	167	32	26	58
13	Bawen	9	12	21	1		1	25	36	61	7	4	11
14	Bringin	98	124	222	2	1	3	104	97	201	102	11	113
15	Bancak	35	67	102		1	1	67	87	154	14	8	22
16	Pringapus	112	96	208	2	1	3	65	58	123	54	37	91
17	Bergas	100	88	188	1	1	2	142	110	252	33	27	60
18	Ungaran Barat	112	96	208	4	4	8	180	139	319	120	92	212
19	Ungaran Timur	190	157	347	4	8	12	203	219	422	128	102	230

2018	1740	1697	3437	31	26	57	2339	2265	4604	801	640	1441
2017	1812	1728	3540	28	25	53	3037	2696	5733	774	1350	2124
2016	1958	1901	3859	32	34	66	2949	2727	5676	981	825	1806
2015	1920	1913	3833	29	31	60	2946	2781	5727	744	625	1369
2014	1968	1994	3962	33	31	64	3493	3198	6691	697	612	1309

Sumber: Penimbangan Serentak 2018

Berdasarkan data pada tabel 2.17 di atas dapat diketahui bahwa jumlah balita gizi kurang, gizi buruk dan stunting cenderung menurun tiap tahunnya, namun penurunannya belum signifikan. Jika dilihat jumlah balita gizi kurang, gizi buruk dan stunting justru paling banyak terjadi kasus pada wilayah perkotaan seperti di Kecamatan Ungaran Timur, Ungaran Barat, Jambu, Sumowono. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya perhatian keluarga / orang tua terkait pemenuhan gizi anaknya. Orang tua yang sibuk bekerja tidak terlalu memperhatikan asupan yang diberikan kepada anak, sehingga anak cenderung mengonsumsi makanan rendah gizi.

Tabel 2.18
Jumlah Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif

No	Puskesmas	Jumlah Bayi			ASI Ekseklusif		
		L	P	T	L	P	T
1	Getasan	70	68	138	20	38	58
	Jetak	75	76	151	39	41	80
2	Tengaran	241	251	492	154	137	291
3	Susukan	193	184	377	134	139	273
4	Kaliwungu	89	80	169	58	48	106
5	Suruh	143	138	281	91	96	187
	Dadapayam	124	128	252	98	86	184
6	Pabelan	95	81	176	61	73	134
	Semowo	58	60	118	42	40	82
7	Tuntang	136	138	274	97	93	190
	Gedangan	74	73	147	50	40	90
8	Banyubiru	144	146	290	87	82	169
9	Jambu	124	112	236	62	69	131
10	Sumowono	94	97	191	47	37	84
11	Ambarawa	233	222	455	94	61	155
12	Duren	85	90	175	61	72	133
	Jimbaran	88	82	170	38	50	88
13	Bawen	179	183	362	59	72	131
14	Bringin	182	176	358	63	63	126
15	Bancak	88	69	157	39	26	65
16	Pringapus	210	224	434	54	41	95
17	Bergas	167	170	337	63	73	136
18	Ungaran	102	98	200	52	57	109
	Lerep	78	73	151	38	33	71
19	Leyangan	91	102	193	38	50	88
	Kalongan	133	137	270	35	34	69
2018		3296	3258	6554	1674	1651	3325
2017		3228	3116	6344	1616	1645	3261
2016		3373	3251	6624	1621	1647	3268
2015		3334	3271	6605	1511	1450	2961
2014		3394	3268	6662	1503	1448	2951

Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Semarang.

Tabel 2.19
Jumlah Bayi yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap

No	Kecamatan	Jml Desa/ Kel	Jml UCI	Jumlah Bayi			Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap
				L	P	T	
1	Getasan	13	13	340	318	658	
2	Tengaran	15	15	511	487	998	
3	Susukan	13	13	352	320	672	
4	Kaliwungu	11	11	192	156	348	
5	Suruh	17	17	544	551	1.095	
6	Pabelan	17	17	363	323	686	
7	Tuntang	16	16				
8	Banyubiru	10	10	319	322	641	
9	Jambu	10	10	271	284	555	
10	Sumowono	16	16	212	185	397	
11	Ambarawa	10	10	439	385	824	
12	Bandungan	10	10	471	439	910	
13	Bawen	9	9	381	361	742	
14	Bringin	16	16	351	326	677	
15	Bancak	9	9	192	141	323	
16	Pringapus	9	9	367	307	674	
17	Bergas	13	13	479	459	938	
18	Ungaran Barat	11	11	621	592	1.213	
19	Ungaran Timur	10	10	524	476	1.000	

2017	235	235	6.868	6.677	13.545	
2016	235	235	7.188	7.078	14.266	
2015	235	235	7.391	7.056	14.447	
2014	235	235	7.466	7.106	14.572	
2013	235	235	7.295	7.046	14.341	

Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

Tabel 2.20
Jumlah Tenaga Medis di Fasilitas Kesehatan Pemerintah di Kabupaten Semarang Tahun 2016

	Kecamatan	Banyaknya Tenaga Medis					Perawat Umum	Perawat Gigi
		Dokter Spesialis	Dokter	Dokter Gigi	Bidan			
010	Getasan	0	5	2	8	9	1	
020	Tengaran	0	4	1	17	9	2	
030	Susukan	0	3	1	14	7	2	
031	Kaliwungu	0	3	1	8	5	1	
040	Suruh	0	5	2	17	10	3	
050	Pabelan	0	3	2	15	7	3	
060	Tuntang	0	4	2	19	6	3	
070	Banyubiru	0	2	1	12	5	2	
080	Jambu	0	2	1	7	4	1	
090	Sumowono	0	3	1	11	9	2	
100	Ambarawa	0	2	1	8	4	2	
101	Bandungan	0	5	2	9	4	3	
110	Bawen	0	2	1	10	3	2	
120	Bringin	0	3	1	11	8	1	
121	Bancak	0	2	1	6	5	1	
130	Pringapus	0	3	1	17	6	2	
140	Bergas	0	4	1	10	6	2	
151	Ungaran Barat	0	7	2	11	7	3	
152	Ungaran Timur	0	4	2	13	5	3	
	RSU Ungaran	20	13	2	0	164	0	
	RSU Ambarawa	20	11	2	36	201	4	
	RS Bina Kasih	12	4	1	25	28	0	
	RS Ken Saras Bergas	64	21	7	25	216	4	
	Labkesda	1	0	0	0	0	0	
	Jumlah 2016	117	115	38	309	728	47	
	2015	118	112	36	404	678	50	
	2014	119	114	37	389	673	52	
	2013	109	136	40	377	609	37	
	2012	86	134	38	383	577	28	
	2011	59	188	37	380	581	48	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Semarang

Tabel 2.21
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Semarang Tahun 2016

Kecamatan	Banyaknya Fasilitas Kesehatan			
	Rumah Sakit Umum	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	
010	Getasan	-	2	4
020	Tengaran	-	1	5
030	Susukan	-	1	4
031	Kaliwungu	-	2	3
040	Suruh	-	2	5
050	Pabelan	-	2	7
060	Tuntang	-	2	3
070	Banyubiru	-	1	3
080	Jambu	-	1	3
090	Sumowono	-	1	6
100	Ambarawa	2	1	2
101	Bandungan	-	2	2
110	Bawen	-	1	2
120	Bringin	-	1	4
121	Bancak	-	1	2
130	Pringapus	-	1	4
140	Bergas	1	1	4
151	Ungaran Barat	1	2	2
152	Ungaran Timur	1	2	3
	Jumlah 2016	5	27	68
	2015	4	26	67
	2014	4	26	68
	2013	4	26	68
	2012	4	26	68
	2011	4	26	68

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Semarang

Tabel 2.22
Data Persalinan dan Bayi Lahir Hidup/Mati di Puskesmas/Unit Swasta 2018

No	Puskesmas	Persalinan	Bayi lahir	
			Hidup	Mati
1	Getasan	302	305	2
2	Jetak	299	307	12
3	Tengaran	974	975	6
4	Susukan	605	606	1
5	Kaliwungu	341	343	3
6	Suruh	587	593	7
7	Dadapayam	438	439	2

No	Puskesmas	Persalinan	Bayi lahir	
			Hidup	Mati
8	Pabelan	365	366	1
9	Semowo	255	254	6
10	Tuntang	521	514	1
11	Gedangan	290	292	0
12	Banyubiru	564	563	4
13	Jambu	533	533	2
14	Sumowono	439	441	1
15	Ambarawa	870	867	5
16	Duren	462	462	6
17	Jimbaran	376	376	3
18	Bawen	647	648	5
19	Bringin	627	621	7
20	Bancak	318	321	1
21	Bergas	933	931	9
22	Pringapus	756	758	3
23	Ungaran	511	512	2
24	Lenyep	587	590	0
25	Leyangan	439	441	0
26	Kalongan	530	531	4
Jumlah		13569	13589	93

2018	13569	13589	93
2017	13387	12796	76
2016	13554	13541	89
2015	14167	14127	96
2014	13847	13859	89
2013	14129	14141	105

Sumber : Dinas kesehatan Kabupaten Semarang.

Tabel 2.23
Data Taman Posyandu di Kabupaten Semarang

No	Kecamatan	Jumlah Taman Posyandu		
		2015	2016	2017
1	Getasan	0	0	0
2	Tengaran	35	35	35
3	Susukan	14	14	14
4	Kaliwungu	10	10	10
5	Suruh	0	0	0
6	Pabelan	0	0	0

No	Kecamatan	Jumlah Taman Posyandu		
		2015	2016	2017
7	Tuntang	1	1	1
8	Banyubiru	0	0	0
9	Jambu	16	16	16
10	Sumowono	7	7	7
11	Ambarawa	4	4	4
12	Bandungan	11	11	11
13	Bawen	0	0	0
14	Bringin	12	12	12
15	Bancak	0	0	0
16	Pringapus	14	14	14
17	Bergas	0	0	0
18	Ungaran Barat	16	16	16
19	Ungaran Timur	0	0	0
	Jumlah	140	140	140

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab Semarang.

2.1.4. Kekerasan Terhadap Anak

Perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, trafficking, dan penyelenggaraan hak perempuan dan anak yang terjadi di rumah tangga, sekolah, atau publik perlu ditingkatkan dan untuk itu perlu diketahui data-data terkait untuk melaksanakan/membuat suatu kebijakan perihal perlindungan anak. Untuk mengetahui data korban kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Semarang dapat disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.24
Data Korban Kekerasan Anak (Baik Kekerasan Seksual)

No	Kecamatan	Jumlah Kekerasan		
		2015	2016	2017
1	Getasan	1	0	1
2	Tengaran	1	1	1
3	Susukan	0	0	1
4	Kaliwungu	2	0	1
5	Suruh	0	1	0
6	Pabelan	8	6	2
7	Tuntang	7	5	3
8	Banyubiru	2	3	0
9	Jambu	1	0	1

No	Kecamatan	Jumlah Kekerasan		
		2015	2016	2017
10	Sumowono	19	5	5
11	Ambarawa	3	8	2
12	Bandungan	3	5	0
13	Bawen	4	7	6
14	Bringin	3	6	4
15	Bancak	0	0	0
16	Pringapus	0	0	0
17	Bergas	15	16	6
18	Ungaran Barat	11	5	3
19	Ungaran Timur	8	7	1
Jumlah		88	75	37

2017	37
2016	75
2015	88
2014	18
2013	14

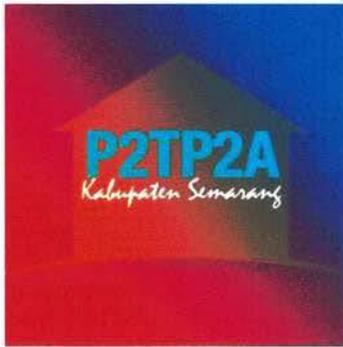
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab Semarang

Tabel 2.25
Lembaga Yang Memiliki Kepedulian Terhadap Anak

No	Nama lembaga	Alamat
1	Kampoeng Peduli Indonesia	Ungaran
2	Gereja Isa Almasih	Ungaran
3	KPAI	Bawen
4	Aisyiyah	Tuntang
5		
6		
7		
8		

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab Semarang.

Pemerintah Kabupaten Semarang juga turut berupaya melakukan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan, dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) NURANI Kabupaten Semarang. Selanjutnya dibentuk Tim Pengelola P2TP2A Kabupaten Semarang berdasarkan SK Bupati Semarang Nomor 467/0703/2017 tanggal 3 Januari 2017.



P2TP2A Kabupaten Semarang berdiri pada Tahun 2014 dengan nama NURANI, yang terbentuk berdasarkan SK Bupati Semarang Nomor 467/0186/2014 tanggal 18 Februari 2014. Pembentukan ini atas dasar kerjasama antara Pemerintah Daerah, Polri, RSUD, LSKAR, Kejaksaan Negeri, Organisasi Perempuan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di Kabupaten Semarang untuk memberikan peayanan berupa pendampingan, advokasi dan bantuan hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Visi :

“P2TP2A sebagai wahana pendampingan dan perlindungan hukum bagi Perempuan dan Anak dalam upaya Penghapusan segala bentuk kekerasan berbasis gender di Kabupaten Semarang”

Misi :

1. Melindungi hak-hak korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak korban kekerasan;
3. Menghapuskan segala bentuk kekerasan berbasis gender dan penegakan hukum;
4. Memberikan pendampingan, advokasi, konseling dan menyiapkan shelter/rumah aman.

Gambar 2.1
Salah satu kegiatan P2TP2A bersama dengan Polres Semarang menyelenggarakan FGD dalam rangka menanggulangi kekerasan pada anak oleh anak dibawah umur, tanggal 27 Februari 2018.



2.1.5. Sosial Budaya

Data terkait sosial budaya anak-anak di Kabupaten Semarang sebagai berikut :

Tabel 2.26
Data Masalah Sosial Anak Menurut Jenis PMKS

NO	JENIS PMKS	TAHUN 2017				TAHUN 2018			
		(Σ)L	(Σ)P	JUMLAH	(Σ)KK	(Σ)L	(Σ)P	JUMLAH	(Σ)KK
1	2	9	10	11	12	9	10	11	12
1	Anak Balita Terlantar	168	125	293	-	132	158	290	-
2	Anak Terlantar	796	677	1.473	-	340	318	658	-
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	15	-	15	-	11	18	29	-
4	Anak Jalanan	139	23	162	-	69	65	134	-
5	Anak dengan Kedisabilitas				-	-	-	-	-
a)	Anak dengan Kedisabilitas Fisik				-	-	-	-	-
	a.1) Tubuh (Tuna Daksa)	269	200	469	-	122	103	225	-
	a.2) Mata (Tuna Netra)	43	21	64	-	39	30	69	-
	a.3) Rungu/Wicara (Bisu/Tuli)	56	46	102	-	97	57	154	-
b)	Disabilitas Mental				-	-	-	-	-
	b.1) Mental Retardasi (Tuna Grahita)	85	61	146	-	138	91	229	-
	b.2) Mental Eks Psikotik (Tuna Laras)	26	17	43	-	3	2	5	-
c)	Disabilitas Fisik dan Mental (Disabilitas Ganda)	28	17	45	-	85	59	144	-
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah	5	33	38	-	-	-	-	-
7	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	3	37	40	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Semarang, 2017

Tabel 2.27
Data Jumlah Anak yang Tinggal di LKSA 2016/2017

No	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	Jumlah Anak			SOP	
		L	P	T	Ya	Tidak
1	LKSA Sahal Suhall	25	25	50	√	
2	LKSA Yadayanu	20	13	33	√	
3	LKSA Putri Aisiyah	0	55	55	√	
4	LKSA Putra Muhamadiyah	32	0	32	√	
5	LKSA Sumber Kasih	8	12	20	√	
6	LKSA Amanah	13	7	20	√	
7	LKSA Permata Hati	15	6	21	√	
8	LKSA Yapenyatu	31	19	50	√	
9	LKSA Eklesia	16	14	30		√
10	LKSA Darul Hadionah	10	10	20	√	
11	LKSA Dar Al Yatama	15	10	25	√	
12	LKSA Harapan	35	39	74	√	
13	LKSA Al Mustofa	5	17	22	√	
14	LKSA Ar'riayah	20	16	36	√	
15	LKSA Al Ittihad	15	17	32	√	
16	LKSA Darul Chaldonah	20	8	28	√	
17	LKSA Keluarga Sakinah	0	15	15	√	
18	LKSA Baitul Falah	7	10	17	√	
19	LKSA Muhammadiyah	6	6	12	√	
20	LKSA Darul Yatama	25	32	57	√	
21	LKSA Hisyam Nur Mustofa	13	7	20	√	
22	LKSA Servantius	14	0	14	√	
23	LKSA Amal Sholeh	6	10	16	√	
24	LKSA Kasih Harapan	24	23	47	√	
25	LKSA Cahaya Karunia	14	15	29	√	
26	LKSA Putra Al Maun	10	0	10	√	
27	LKSA Zam-zam Al Hazim	9	21	30	√	
28	LKSA Al Muawanah	10	13	23	√	
29	LKSA Hj Aminah	10	0	10	√	
30	LKSA Santo Thomas	20	23	43	√	
31	LKSA Sinar Bunda Annisa	10	3	13	√	
32	LKSA Rahmatillah	10	10	20	√	
JUMLAH KESELURUHAN		468	456	924		

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Semarang, 2017

Pernikahan muda menurut Kementerian Agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan calon istri umur 16 – 19 tahun. Di Kabupaten Semarang juga terdapat kasus pernikahan muda, dimana datanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.28
Data Pernikahan Muda di Kabupaten Semarang

Tahun	Jumlah
2015	196
2016	208
2017	94

Sumber : Kementerian Agama Wilayah Kabupaten Semarang, 2017

Dari data di atas diketahui bahwa jumlah kasus pernikahan muda di Kabupaten Semarang cenderung menurun tiap tahunnya. Namun demikian, perlu terus dilakukan upaya pencegahannya melalui sosialisasi kepada remaja usia 13-18 tahun dan orang tuanya mengenai dampak pernikahan muda. Ini membutuhkan peran dan dukungan tidak hanya dari pemerintah saja, namun juga segenap lapisan masyarakat.

2.1.6. Pemerintah, Hukum dan Politik

Dalam rangka menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, perlu dilakukan pembangunan kesejahteraan perlindungan anak yang terintegrasi melalui kebijakan Kabupaten Layak Anak. Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak, Pemerintah Kabupaten Semarang membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor : 890/0078/2018 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Semarang. Gugus Tugas KLA ini beranggotakan dari unsur eksekutif, lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yudikatif

yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan dunia usaha.

Gugus Tugas KLA diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Sekretariat Tetap (Sektap) yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinas P3AKB) Kabupaten Semarang.

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA:

1. Mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak;
2. Menyusun Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
3. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan Kabupaten Layak Anak;
4. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
5. Melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak; dan
6. Membuat laporan kepada Bupati Semarang.

Berkaitan dengan kasus anak bermasalah dengan hukum dari kepolisian, pengadilan, anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, penanganan kasus anak bermasalah dengan hukum di Kabupaten Semarang telah difasilitasi oleh P2TP2A sebagai wadah koordinasi dengan instansi terkait. Berikut data anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Semarang sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.29
Data Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kabupaten Semarang

No	Kecamatan	Jumlah konflik		
		2015	2016	2017
1	Getasan	-	-	-
2	Tengaran	-	-	-
3	Susukan	-	-	-
4	Kaliwungu	-	-	-
5	Suruh	3	-	-
6	Pabelan	-	-	-
7	Tuntang	-	-	1
8	Banyubiru	-	1	-
9	Jambu	-	-	-
10	Sumowono	-	1	1
11	Ambarawa	-	-	-
12	Bandungan	1	2	-
13	Bawen	1	-	2
14	Bringin	-	-	-
15	Bancak	-	-	-
16	Pringapus	1	-	1
17	Bergas	-	2	-
18	Ungaran Barat	1	-	-
19	Ungaran Timur	1	-	-
Jumlah		8	6	5

2017	5
2016	6
2015	8

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab Semarang.

Tabel 2.30
Data Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan 2017

Kecamatan	Tempat Ibadah							Jumlah	
	Masjid	Mushola	Gereja Kristen	Gereja Katolik	Pura	Vihara	Klenteng		
010	Getasan	109	47	77	1	-	15	-	249
020	Tengaran	104	196	22	1	-	1	-	324
030	Susukan	100	233	3	-	-	3	-	339
031	Kalwungu	53	83	36	-	-	8	-	180
040	Suruh	106	311	8	1	-	2	-	428
050	Pabelan	85	200	13	-	-	1	-	299
060	Turtang	98	225	27	1	-	8	-	359
070	Banyubiru	92	90	7	3	-	-	-	192
080	Jambu	90	150	3	3	-	3	-	249
090	Sumowono	62	93	18	2	-	8	-	183
100	Ambarawa	70	101	20	4	2	-	1	198
101	Bandungan	78	175	11	2	-	-	-	266
110	Bawen	59	71	11	9	2	-	-	152
120	Bringin	102	217	3	1	-	2	-	325
121	Bancak	71	139	-	-	-	-	-	210
130	Pringapus	61	146	6	2	-	1	-	216
140	Bergas	66	240	12	3	-	-	-	321
151	Ungaran Barat	102	320	21	1	-	-	-	444
152	Ungaran Timur	72	270	15	1	-	1	-	359
	Jumlah 2017	1 580	3 307	313	35	4	53	1	5 293
	2016	1580	3306	324	32	3	56	1	5302
	2015	1634	3235	316	36	5	53	1	5280
	2014	1634	3230	315	36	5	53	1	5274
	2013	1634	3230	243	36	5	52	1	5201
	2012	1563	2985	277	35	9	55	1	4925
	2011	1562	2876	251	17	8	55	1	4770

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Semarang

Tabel 2.31
Data Indikator Kemiskinan Kabupaten Semarang 2009-2017

Uraian	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keperahan Kemiskinan								
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk Miskin (000)	96.12	87.89	95.99	90.33	83.20	79.76	81.25	80.72	79.66
Persentase Penduduk Miskin (persen)	10.40	10.50	10.30	9.40	8.51	8.05	8.15	7.99	7.78
Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI)	1.43	1.45	1.60	1.37	0.92	1.20	1.33	1.57	1.10
Indeks Keperahan Kemiskinan (P2)	0.34	0.32	0.44	0.38	0.17	0.29	0.30	0.45	0.25
Garis Kemiskinan (Rp/KapitaBulan)	189.62	206.308	227.471	244.732	261.352	275.612	286.518	307.505	317.935

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Semarang

Tabel 2.32
Panjang Jalan Menurut Pemerintah yang Berwenang Mengelolanya di Kabupaten Semarang Tahun 2010 - 2016

Jenis Jalan	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jalan Negara	47.55	52.65	59.65	54.75	54.75	54.75	54.75
Jalan Provinsi	82.51	83.65	83.65	82.51	82.51	82.51	82.51
Jalan Kabupaten	733.62	733.62	733.62	733.62	735.82	735.52	735.52
Jumlah	863.68	869.92	876.92	870.88	873.08	872.78	872.78

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Semarang

2.2. Kebutuhan Anak Kabupaten Semarang

2.2.1. Fasilitas Yang Dibutuhkan Anak di Rumah

Fasilitas yang dibutuhkan anak di rumah misalnya :

1. Keharmonisan keluarga baik antara ayah dan ibu serta saudara ataupun keluarga yang lainnya.
2. Kondisi tempat tinggal yang layak, baik dari segi sanitasi lingkungannya maupun kelayakan bangunannya.
3. Pendidikan sopan santun, kasih sayang, agama dan tauladan dari keluarganya.

Sebagai penunjang hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah berupaya melaksanakan sosialisasi atau parenting bagi orangtua tentang cara mendidik anak dengan kasih sayang.

2.2.2. Fasilitas Yang Dibutuhkan Anak di Sekolah

Fasilitas yang dibutuhkan anak di sekolah misalnya:

1. Kondisi sekolah yang aman baik dari kebisingan, kejahatan, bencana, bangunan yang rusak dan sebagainya termasuk Rute Aman Selamat Sekolah.
2. Bapak dan Ibu guru yang ramah anak dan memahami psikologi/karakter anak.
3. Suasana sekolah yang baik sanitasi dan lingkungannya termasuk kawasan bebas asap rokok.
4. Sarana dan prasarana belajar yang memadai termasuk sarana prasarana olah raga.

2.2.2. Fasilitas Yang Dibutuhkan Anak di Kabupaten Semarang

Fasilitas yang dibutuhkan anak di Kabupaten Semarang misalnya:

1. Ruang terbuka hijau ataupun taman yang dapat digunakan dalam berbagai aktivitas seperti bermain, *refreshing*, belajar dan sebagainya.
2. Perpustakaan baik umum, keliling maupun wilayah sebagai sarana studi, literatur maupun *refreshing*.
3. Sarana prasarana layanan umum seperti layanan kesehatan yang memadai, sarana jalan yang ramah anak, gedung untuk menampilkan ekspresi anak dan sebagainya.
4. Peraturan tentang Perlindungan anak.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)
KABUPATEN SEMARANG

3.1. Visi dan Misi Kabupaten Semarang

Sejalan dengan Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016 – 2021 disebutkan bahwa visi yang ingin dicapai adalah **“PENEGUHAN KABUPATEN SEMARANG YANG MAJU, MANDIRI, TERTIB DAN SEJAHTERA (MAJU MATRA II)”** dengan misi :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi local (INTANPARI) yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.
3. Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *good governance* didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi.
4. Menyediakan infrastuktur daerah yang merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan pembangunan.
5. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak disemua bidang pembangunan.
6. Mendorong terciptanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya.

Visi Kabupaten Semarang Layak Anak adalah **“Mewujudkan Kabupaten Semarang menjadi Kabupaten yang nyaman, aman, kondusif dan kreatif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak”**.

Misinya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan fasilitas dan layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai;
2. Meningkatkan fasilitas ruang gerak dan kreativitas anak di Kabupaten Semarang;
3. Meningkatkan peraturan tentang perlindungan hak anak di Kabupaten Semarang;
4. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam pemenuhan hak anak dengan swasta, instansi vertikal dan lainnya.

BAB IV

PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN SEMARANG

4.1. Indikator Kabupaten/ Kabupaten Layak Anak

Indikator Umum : Penguatan Kelembagaan

Konvensi Hak Anak, meliputi 5 Klaster Hak Anak yaitu :

1. Hak Sipil dan Kebebasan
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
5. Perlindungan Khusus

Secara rinci indikator Kabupaten/Kota Layak Anak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
INDIKATOR KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA)

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
I.	KELEMBAGAAN		
1.	Tersedia Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak <i>Ukuran:</i> • <i>Ada dan dilaksanakan</i>		
1.	Apakah tersedia peraturan/kebijakan daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan Daerah (Perda) (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota (c) Perda sedang dalam proses	√ √ √
2.	Apakah tersedia anggaran untuk melaksanakan peraturan/kebijakan tersebut? Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) Ya (b) Tidak (a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	√ √
3.	Apakah dalam proses penyusunan peraturan/kebijakan daerah dan pelaksanaan peraturan/kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA sudah memperhatikan kepentingan dan pandangan anak?	(a) Ya (b) Tidak	

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
	Jika Ya, apakah kepentingan dan pandangan anak tersebut sudah ditindaklanjuti?	(a) Ya, seluruhnya (b) Ya, sebagian (c) Tidak	√ √
2.	<p>Terlembaganya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)</p> <p>Ukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ada Gugus Tugas KLA, dan berfungsi</i> • <i>Ada Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA</i> • <i>Ada data dan informasi Profil Anak teragregasi, dan diperbarui setiap tahun</i> • <i>Persentase Kecamatan Layak Anak (KELANA), dan meningkat setiap tahun</i> • <i>Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA), dan meningkat setiap tahun</i> • <i>Persentase DEKELA yang mengintegrasikan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)/sejenisnya</i> 		
	Gugus Tugas (GT) KLA		
1.	Apakah sudah terbentuk GT KLA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apakah sudah berfungsi?	(a) Berfungsi penuh (Kelembagaan dan 5 Klaster KLA) (b) Berfungsi sebagian	√
2.	Apakah GT KLA memiliki dasar hukum?	(a) Ya (b) Tidak	√
3.	Apakah struktur Gugus Tugas KLA sudah mencakup Kelembagaan dan 5 Klaster KLA?	(a) Ya (b) Tidak	√
4.	Apakah tersedia anggaran untuk GT KLA?	(a) Ya (b) Tidak	
5.	Berapa kali GT KLA mengadakan rapat koordinasi dalam 1 tahun?	(a) > 4 kali (b) 1-4 kali	√ √
	Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA		
6.	Apakah sudah ada RAD KLA?	(a) Ya (b) Tidak	

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
	Jika Ya, apakah sudah komprehensif mencakup program dan kegiatan untuk pelaksanaan semua Indikator KLA? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Kelembagaan (b) Klaster 1 (c) Klaster 2 (d) Klaster 3 (e) Klaster 4 (f) Klaster 5	√ √ √ √ √ √
7.	Apakah RAD KLA terintegrasi dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan/atau tahunan?	(a) Ya (b) Tidak	
8.	Apakah tersedia mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD KLA?	(a) Ya (b) Tidak	√
	Profil Anak		
9.	Apakah sudah ada Data dan Informasi Profil Anak lengkap dan teragregasi? Jika Ya, apakah diperbarui setiap tahun?	(a) Ya (b) Tidak (a) Ya (b) Tidak	√ √
	Launching KLA		
10.	Apakah KLA sudah dideklarasikan oleh Bupati/Walikota? Jika Ya, sebutkan tahun berapa KLA dideklarasikan? Catatan	(a) Ya (b) Tidak Tahun ...	√
11.	Kecamatan Layak Anak (KELANA) Berapa persentase KELANA? Jumlah kecamatan? Catatan Jumlah kecamatan yang menuju KELANA selama 2 tahun terakhir? (Jika 2018>2017, maka nilai 5)	(a) > 50 % (b) ≤ 50 % (c) Belum ada ... Kecamatan Tahun 2017: ... KELANA Tahun 2018: ... KELANA	√ √
12.	Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA) Berapa persentase DEKELA? Jumlah desa/kelurahan? Catatan Jumlah desa/kelurahan yang menuju DEKELA selama 2 tahun terakhir? (Jika 2018>2017, maka nilai 5)	(a) > 25 % (b) ≤ 25 % (c) Belum ada ... Desa/Kelurahan Tahun 2017: ... DEKELA Tahun 2016: ... DEKELA	√ √
13.	Berapa persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)?	(a) > 25 % (b) ≤ 25 % (c) Belum ada	√ √

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan (PATBM)? Catatan	... Desa/Kelurahan	
14.	Apakah ada KIE tentang KLA? Jika Ya, sebutkan bentuk KIE tersebut! (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya	
		(b) Tidak	
		(a) Media cetak	
		(b) Media luar ruang	
		(c) Media elektronik	
		(d) Media sosial	
		(e) Lainnya	
3.	Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak Ukuran: • Ada, dan meningkat setiap tahun		
1.	Apakah Lembaga Masyarakat (LM) berperan dalam mewujudkan KLA?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kelembagaannya? Catatan (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Kelompok relawan	√
		(b) LSM atau Forum LSM	√
		(c) Perguruan Tinggi	√
	Jika Ya, apa bentuk kegiatannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi	√
		(b) Relawan/SDM	√
(c) Pendanaan		√	
		(d) Prasarana dan sarana	√
		(e) Lainnya	√
	Sebutkan LM yang berperan selama 2 tahun terakhir! (Jika 2018>2017; maka nilai: 2)	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
2.	Apakah Dunia Usaha (DU) berperan dalam mewujudkan KLA?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kegiatannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Kebijakan perusahaan yang peduli anak	√
		(b) Produk	√
		(c) Program (CSR)	√
		(d) Prasarana dan sarana	√
	Sebutkan DU yang berperan? (Jika 2018>2017; maka nilai: 2)	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
3.	Apakah sudah membentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten/Kota?	(a) Ya	√
		(b) Tidak	
	Jika Ya, kapan (APSAI) Kabupaten/Kota dibentuk? Catatan	Tahun ...	

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
4.	Apakah Media Massa (MM) berperan dalam mewujudkan KLA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kegiatannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pemberitaan layak anak (b) Kampanye (c) Pendanaan (d) Prasarana dan sarana (e) Lainnya	√ √ √ √ √
	Sebutkan MM yang berperan? (Jika 2018>2017; maka nilai: 2)	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
II. KLASSTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN			
4.	Persentase Anak yang Teregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran Ukuran: <ul style="list-style-type: none"> • 100% Anak teregistrasi • Persentase anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran di atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun 		
	Berapa jumlah anak (usia di bawah 18 tahun)? Catatan	Tahun 2018: ... orang anak	
1.	Apakah tersedia peraturan/kebijakan daerah terkait dengan percepatan pelaksanaan registrasi kelahiran dan pemberian Kutipan Akta Kelahiran?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√ √
2.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan percepatan pelaksanaan registrasi kelahiran dan pemberian Kutipan Akta Kelahiran?	(a) Ya (b) Tidak	√
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	√ √
3.	Apakah pemberian Kutipan Akta Kelahiran bagi anak usia >60 hari - <18 tahun dibebaskan dari bea (gratis)?	(a) Ya (b) Tidak	√
	Jika Tidak, berapa biaya yang dikenakan? Catatan	Rp. ...	
4.	Apakah semua anak lahir teregistrasi?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, berapa persentase anak teregistrasi selama 2 tahun terakhir? (Jika 2018>2017; maka nilai: 5)	Tahun 2017 : % Tahun 2018 : %	

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
5.	Apakah semua anak telah mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, berapa persentase anak mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran selama 2 tahun terakhir? (Jika 2018>2017; maka nilai: 5)	Tahun 2017 % Tahun 2018 %	
6.	Apakah mekanisme di masyarakat untuk registrasi kelahiran dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran berjalan efektif?	(a) Ya (b) Tidak	√
7.	Apakah SDM penyelenggara registrasi kelahiran telah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya? <i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(a) Pemda (b) Pusat	√ √
8.	Apakah Forum Anak/kelompok anak berperan dalam percepatan kepemilikan Akta Kelahiran?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? <i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(a) Sosialisasi (b) Melaporkan ke Dinas PPPA (a) Lainnya	√ √ √
	Sebutkan FA yang berperan! Catatan		
9.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) untuk percepatan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? <i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(a) Sosialisasi (b) Pemberian Surat Keterangan (c) Dukungan dan sinergi kegiatan (d) Pemberian data dan informasi	√ √ √ √
	Sebutkan PD yang berperan! Catatan		
10.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam percepatan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? <i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(a) Sosialisasi (b) Pendanaan (c) Lainnya	√ √ √
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan		

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
11.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam percepatan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi (b) Pendanaan (c) Dukungan kegiatan	√ √ √
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan		
12.	Apakah ada kemitraan dengan media massa (MM) dalam percepatan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran?	(a) Ya (b) Tidak	√
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pemberitaan (b) Lainnya	√ √
	Sebutkan MM yang berperan! Catatan		
13.	Apakah ada program inovasi untuk percepatan registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran?	(a) Ya (b) Tidak	√
	Jika Ya, apa bentuk inovasinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Produk (b) Metode (c) Teknologi	√ √ √
5.	Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) Ukuran: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah fasilitas ILA meningkat setiap tahun, dapat diakses oleh semua anak, dan tanpa biaya • Ada mekanisme pengawasan konten informasi yang tidak layak anak • Telepon Sahabat Anak (TeSA)/sejenisnya berfungsi 		
1.	Apakah tersedia peraturan/kebijakan daerah terkait dengan layanan ILA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√ √
2.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan layanan ILA?	(a) Ya (b) Tidak	

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	√ √
3.	Apakah ada fasilitas ILA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, sebutkan bentuk fasilitas ILA? Catatan	(a) Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) (b) Perpustakaan Keliling (c) Taman Bacaan (d) Lainnya	√ √
4.	Berapa jumlah fasilitas ILA selama 2 tahun terakhir? (Jika 2018>2017; maka nilai: 4)	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
	Berapa rata-rata jumlah anak yang mengakses layanan ILA per tahun selama 2 tahun terakhir? (Jika 2018>2017; maka nilai: 3)	Tahun 2017: ... anak Tahun 2018: ... anak	
5.	Apakah tersedia mekanisme pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apakah mekanisme tersebut berjalan optimal?	(a) Ya (b) Tidak	√
	Jika Ya, sebutkan bentuk mekanisme tersebut? Catatan	...	
6.	Apakah tersedia layanan Telepon Sahabat Anak (TeSA)/ sejenisnya?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, bagaimana mengaksesnya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Gratis (b) Tidak gratis (c) Melayani 24 jam (d) Tidak melayani 24 jam	√ √ √ √
7.	Apakah tersedia SDM penyelenggara layanan ILA yang dilatih Konvensi Hak Anak?	(a) Ya (b) Tidak	√
	Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pemda (b) Pusat	√ √
8.	Apakah Forum Anak/kelompok anak berperan dalam layanan ILA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi (b) Melaporkan ke Dinas PPPA	√ √
	Sebutkan FA yang berperan! Catatan		
9.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pengembangan layanan ILA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi (b) SDM (c) Prasarana dan sarana (d) Pemberian data dan informasi layak anak	√ √ √ √

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
	Sebutkan PD yang berperan! Catatan		
10.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam pengembangan layanan ILA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi (b) SDM (c) Pendanaan (d) Prasarana dan sarana (e) Pengawasan konten informasi layak anak	√ √ √ √ √
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan		
11.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam pengembangan layanan ILA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi (b) SDM (c) Pendanaan (d) Prasarana dan sarana	√ √ √ √
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan		
12.	Apakah ada kemitraan dengan media massa dalam pengembangan layanan ILA?	(a) Ya (b) Tidak	√
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi (b) Pendanaan (c) Prasarana dan sarana (d) Tidak menayangkan konten yang tidak layak anak	√ √ √
	Sebutkan MM yang berperan! Catatan		
13.	Apakah ada program inovasi untuk pengembangan layanan ILA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk inovasinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Produk (b) Metode (c) Teknologi	√ √ √
6.	Terlembaganya Partisipasi Anak Ukuran: <ul style="list-style-type: none"> • Ada Forum Anak Kabupaten/Kota, dan aktif • Persentase Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Desa/Kelurahan, dan meningkat setiap tahun • Persentase Forum Anak yang berperan sebagai pelopor dan pelapor (2P), dan meningkat setiap tahun 		

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Forum Anak yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, dan meningkat setiap tahun 		
1.	Apakah tersedia kebijakan daerah terkait pembentukan Forum Anak/kelompok anak?	(a) Ya (b) Tidak	√
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Surat Keputusan Bupati/Walikota (b) Surat Keputusan Kepala Dinas/Badan	√ √
2.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan Forum Anak/kelompok anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	√ √
3.	Apakah Forum Anak Kabupaten/Kota aktif sebagai 2P?	(a) Ya (b) Tidak	
4.	Apakah semua kecamatan memiliki Forum Anak?	(a) >50 % (b) ≤50 % (c) Belum ada	√ √
	Berapa jumlah Forum Anak Kecamatan?	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
	(Jika 2018>2017; maka nilai: 3)		
5.	Apakah semua desa/kelurahan memiliki Forum Anak?	(a) > 25 % (b) ≤ 25 % (c) Belum ada	√ √ √
	Berapa jumlah Forum Anak Desa/Kelurahan?	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
	(Jika 2018>2017; maka nilai: 3)		
6.	Apakah Forum Anak/kelompok anak sudah berperan dalam proses perencanaan pembangunan daerah?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, mulai tingkat apa? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Musrenbang Desa/Kelurahan (b) Musrenbang Kecamatan (c) Musrenbang Kabupaten/Kota (d) Musrenbang Provinsi (e) Musrenbang Nasional	√ √ √ √ √
	Berapa jumlah Forum Anak yang berperan dalam proses perencanaan pembangunan daerah?	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
	(Jika 2018>2017; maka nilai: 2)		

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
7.	Apakah Forum Anak/kelompok anak berperan sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor)?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apakah sudah berperan dalam? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) 2P dalam Klaster 1 (b) 2P dalam Klaster 2 (c) 2P dalam Klaster 3 (d) 2P dalam Klaster 4 (e) 2P dalam Klaster 5	√ √ √ √ √
	Berapa jumlah FA yang berperan dalam 2P? (Jika 2018>2017; maka nilai: 2)	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
8.	Apakah Forum Anak/kelompok anak dilatih Konvensi Hak Anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya?	(a) Pemda (b) Pusat	√ √
9.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah untuk peningkatan kapasitas Forum Anak/kelompok anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pelatihan (b) Pendampingan (c) Prasarana dan sarana	√ √ √
	Sebutkan PD yang berperan! Catatan		
10.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam peningkatan kapasitas Forum Anak/kelompok anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pelatihan (b) Pendampingan (c) Pendanaan (d) Prasarana dan sarana	√ √ √ √
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan		
11.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam peningkatan kapasitas Forum Anak/kelompok anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pelatihan (b) Pendampingan (c) Pendanaan (d) Prasarana dan sarana	√ √ √ √
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan		
12.	Apakah ada kemitraan dengan media massa dalam peningkatan kemampuan kapasitas Forum Anak/kelompok anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pelatihan (b) Pendanaan (c) Prasarana dan sarana	√ √ √

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
	Sebutkan MM yang berperan! Catatan		
13.	Apakah ada program inovasi dalam peningkatan peran Forum Anak/kelompok anak? Jika Ya, apa bentuk inovasinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Produk (b) Metode (c) Teknologi	 √ √ √
III.	KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF		
7.	Persentase Perkawinan Anak Ukuran: • Di bawah angka nasional dan menurun setiap tahun		
1.	Apakah tersedia peraturan/kebijakan daerah terkait dengan pencegahan perkawinan anak? Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Ya (b) Tidak (a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	 √ √
2.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan pencegahan perkawinan anak? Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) Ya (b) Tidak (a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	 √ √
3.	Berapa angka perkawinan anak? Sebutkan angka perkawinan anak selama 2 tahun terakhir! (Jika 2018>2017; maka nilai: 5)	(a) Di bawah angka rata-rata nasional (b) Di atas angka rata-rata nasional (c) Tidak tersedia data Tahun 2017... Tahun 2018...	 √ √
4.	Apa upaya yang dilakukan dalam pencegahan perkawinan anak? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pemberian bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin (b) Pelatihan keterampilan untuk semua anak (c) Pemberian modal usaha kepada keluarga miskin yang mempunyai anak usia sekolah (d) Kampanye/sosialisasi/penyuluhan (e) Lainnya (sebutkan) (f) Belum ada	 √ √ √ √ √

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
5.	Apakah SDM penyelenggara pencegahan perkawinan anak dilatih KHA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya? <i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(a) Pemda (b) Pusat	√ √
	Sebutkan FA yang berperan! Catatan		
6.	Apakah ada keikutsertaan Forum Anak/kelompok anak dalam pencegahan perkawinan anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk keikutsertaannya? <i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(a) Kampanye (b) Sosialisasi (c) Teman sebaya (d) Pelapor	√ √ √ √
	Sebutkan FA yang berperan! Catatan		
	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pencegahan perkawinan anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? <i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(a) Pelatihan (b) Pendampingan (c) Pendanaan (d) Prasarana dan sarana	√ √ √ √
Sebutkan PD yang berperan! Catatan			
8.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam pencegahan perkawinan anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? <i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(a) Pelatihan (b) Pendampingan (c) Pendanaan (d) Prasarana dan sarana	√ √ √ √
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan		
	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam pencegahan perkawinan anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? <i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(a) Pelatihan/kampanye/sosialisasi/penyuluhan (b) Pendampingan (c) Pendanaan (d) Prasarana dan sarana	√ √ √ √
Sebutkan DU yang berperan! Catatan			
9.	Apakah ada kemitraan dengan media massa dalam pencegahan perkawinan anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? <i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(a) Pelatihan/kampanye/sosialisasi/penyuluhan (b) Pendampingan (c) Pendanaan (d) Prasarana dan sarana	√ √ √ √
	Sebutkan MM yang berperan! Catatan		
	Apakah ada kemitraan dengan media massa dalam pencegahan perkawinan anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? <i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(a) Pelatihan (b) Pendampingan (c) Pendanaan (d) Prasarana dan sarana	√ √ √ √
Sebutkan MM yang berperan! Catatan	(e)		

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
4.	Apakah LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)/sejenisnya dimanfaatkan oleh orang tua dan/atau keluarga?	(a) Ya (b) Tidak	√
	Jika Ya, berapa jumlah orang tua dan atau keluarga yang memanfaatkan? Catatan Orang tua/keluarga	
5.	Apakah SDM pada LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)/sejenisnya telah dilatih KHA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya?	(a) Pemda	√
	(bisa lebih dari 1 jawaban)	(b) Pusat	√
6.	Apakah ada keikutsertaan Forum Anak/kelompok anak dalam program LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)/sejenisnya?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk keikutsertaannya?	(a) Pelopor	√
	(bisa lebih dari 1 jawaban)	(b) Pelapor	√
	Sebutkan FA yang berperan! Catatan		
7.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah terkait dalam program LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)/sejenisnya?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya?	(a) Sosialisasi	√
	(bisa lebih dari 1 jawaban)	(b) SDM	√
		(c) Prasarana dan sarana	√
	Sebutkan PD yang berperan! Catatan		
8.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam program LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)/sejenisnya?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya?	(a) Sosialisasi	√
	(bisa lebih dari 1 jawaban)	(b) SDM	√
		(c) Pendanaan	√
		(d) Prasarana dan sarana	√
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan		
9.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam program LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)/sejenisnya?	(a) Ya (b) Tidak	

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi (b) SDM (c) Pendanaan (d) Prasarana dan sarana	√ √ √ √
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan		
10.	Apakah ada kemitraan dengan media massa dalam program LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)/sejenisnya? Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Pemberitaan (b) Pelatihan (c) Promosi	 √ √ √
	Sebutkan MM yang berperan! Catatan		
11.	Apakah terjadi sinergi antar program LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)/sejenisnya dalam memberikan pelayanan? Jika Ya, apa mekanisme sinergi yang dilakukan? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Rapat/Forum koordinasi (b) Mekanisme rujukan (c) Penempatan petugas (d) Sharing data/informasi	 √ √ √ √
12.	Apakah ada program inovasi untuk pengembangan LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)/sejenisnya? Jika Ya, apa bentuk inovasinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Produk (b) Metode (c) Teknologi	 √ √ √
9.	Persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi Ukuran: • Meningkat setiap tahun		
1.	Apakah tersedia peraturan/kebijakan daerah terkait dengan lembaga pengasuhan alternative (LPA)? Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Ya (b) Tidak (a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	 √ √
2.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan LPA?	(a) Ya (b) Tidak	

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	√ √
3.	Apakah tersedia lembaga pengasuhan alternatif?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, sebutkan jumlah LPA selama 2 tahun terakhir? Catatan	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
	Berapa persentase lembaga pengasuhan alternatif yang telah sesuai standar (terstandarisasi)?	...%	
4.	Apakah tersedia LPA bagi anak penyandang disabilitas?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, sebutkan jumlahnya!	... LPA	
5.	Apakah ada anak penyandang disabilitas yang diadopsi?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, sebutkan jumlah anak penyandang disabilitas yang telah diadopsi!	... Orang anak	
6.	Apakah tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, berapa jumlah LKSA dalam 2 tahun terakhir? Catatan	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	√ √
	Jika Ya, berapa jumlah anak yang ada di LKSA? Catatan	(a) anak di LKSA Pemerintah (b) anak di LKSA Swasta/Masyarakat	√ √
	Berapa persentase LKSA yang telah sesuai standar (terstandarisasi)?	...%	
7.	Apakah ada lembaga yang melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap standar penyelenggaraan LPA?	(a) Ya (b) Tidak ada	
	Jika Ya, sebutkan lembaga dimaksud? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Dinas Sosial (b) Lembaga Perlindungan Anak	√ √
8.	Apakah SDM pelayanan LPA dilatih KHA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pemda (b) Pusat (c) Forum LSM/LSM/Perguruan Tinggi	√ √ √
9.	Apakah ada keikutsertaan Forum Anak/kelompok anak dalam pelayanan LPA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi (b) Memberi informasi (c) Melaporkan ke Dinas Sosial	√ √ √

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
	Sebutkan FA yang berperan! Catatan		
10.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pelayanan LPA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi (b) SDM (c) Prasarana dan sarana	√ √ √
	Sebutkan PD yang berperan! Catatan		
11.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam pelayanan LPA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi (b) SDM (c) Pendanaan (d) Prasarana dan sarana	√ √ √ √
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan		
12.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha, dalam penyelenggaraan LPA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi (b) SDM (c) Pendanaan (d) Prasarana dan sarana	√ √ √ √
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan		
13.	Apakah ada kemitraan dengan media massa, dalam penyelenggaraan LPA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pemberitaan (b) Pelatihan (c) Promosi	√ √ √
	Sebutkan MM yang berperan! Catatan		
14.	Apakah ada program inovasi penyelenggaraan LPA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk inovasinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Produk (b) Metode (c) Teknologi	√ √ √
10.	Tersedia Infrastruktur (Sarana dan Prasana) di Ruang Publik yang Ramah Anak Ukuran: <ul style="list-style-type: none"> Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), meningkat setiap tahun, dimanfaatkan oleh semua anak, dan tidak berbayar 		

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Persentase RBRA sesuai standar</i> • <i>Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS), meningkat setiap tahun</i> • <i>Angka kecelakaan lalu-lintas pada anak menurun setiap tahun</i> • <i>Aksesibilitas untuk anak penyandang disabilitas meningkat setiap tahun</i> 		
	Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)		
1.	Apakah ada Ruang Bermain Anak (RBA)?	(a) Ya (b) Tidak	√
	Jika Ya, berapa jumlah RBA?	(a) di desa/kelurahan (b) di kecamatan (c) se-kabupaten/kota	
2.	Bagaimana kondisi fisik RBA yang ada?	(a) < 50% dalam kondisi baik dan terawat (b) > 50% dalam kondisi baik dan terawat	
3.	Apakah tersedia peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Ruang Bermain Ramah Anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√ √
4.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan RBRA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	√ √
5.	Apakah SDM pengelola RBRA dilatih KHA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pemda (b) Pusat	√ √
6.	Apakah sudah dilakukan Audit RBA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, bagaimana hasil audit, berapa Ruang Bermain Anak yang berstatus RBRA (sesuai standar)? (Jika 2018>2017; maka nilai: 5)	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
7.	Apakah RBRA dimanfaatkan oleh semua anak, termasuk anak penyandang disabilitas?	(a) Ya (b) Tidak	
8.	Apakah RBRA tidak berbayar (gratis)?	(a) Ya (b) Tidak	
9.	Siapa yang bertanggungjawab terhadap RBRA? (sebutkan Perangkat Daerah)	Dinas...	
10.	Apakah ada keikutsertaan Forum Anak/kelompok anak dalam penyelenggaraan RBRA? Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Sosialisasi (b) Memberi informasi (c) Melaporkan ke Dinas Pertamanan	 √ √ √
	Sebutkan FA yang berperan! Catatan		
11.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dalam penyediaan RBRA ? Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Sosialisasi (b) SDM (d) Prasarana dan sarana	 √ √ √
	Sebutkan PD yang berperan! Catatan		
12.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam penyediaan RBRA? Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Sosialisasi (b) SDM (c) Pendanaan (d) Prasarana dan sarana	 √ √ √
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan		
13.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha, dalam penyediaan RBRA? Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Sosialisasi (b) SDM (c) Pendanaan (d) Prasarana dan sarana	 √ √ √ √
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan		
14.	Apakah ada kemitraan dengan media massa, dalam penyediaan RBRA? Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Pemberitaan/promosi (b) Pelatihan	 √ √
	Sebutkan MM yang berperan! Catatan		
15.	Apakah ada program inovasi pengembangan RBRA?	(a) Ya (b) Tidak	

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
	Jika Ya, apa bentuk inovasinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Produk (b) Teknologi	√ √
16.	Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah (RASS) Apakah tersedia peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Program RASS? Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	 √ √
17.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan Program RASS ? Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) Ya (b) Tidak (a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	 √ √
18.	Apakah ada sekolah yang memiliki Program RASS? Jika Ya, berapa persentase lembaga pendidikan yang memiliki RASS? (Jika 2018>2017; maka nilai: 5)	(a) Ya (b) Tidak Tahun 2017: (a) ... % PAUD (b) ... % SD/MI (c) ... % SMP/MTs (d) ... % SMA/SMK/MA Tahun 2018: (a) ... % PAUD (b) ... % SD/MI (c) ... % SMP/MTs (d) ... % SMA/SMK/MA	 √ √ √ √ √ √ √ √
19.	Apakah tersedia fasilitas pejalan kaki di sekitar sekolah? Jika Ya, apakah fasilitas pejalan kaki tersebut sudah memperhatikan untuk anak penyandang disabilitas?	(a) Ya (b) Tidak (a) Ya (b) Tidak	
20.	Apakah tersedia fasilitas penyeberangan di sekitar sekolah? Jika Ya, apakah fasilitas penyeberangan tersebut sudah memperhatikan untuk anak penyandang disabilitas?	(a) Ya (b) Tidak (a) Ya (b) Tidak	
21.	Apakah SDM penyelenggara Program RASS dilatih KHA? Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Pemda (b) Pusat	 √ √
22.	Apakah ada keikutsertaan Forum Anak/keompok anak dalam Program RASS?	(a) Ya (b) Tidak	

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi (b) Memberi informasi (c) Melaporkan ke Dinas terkait	√ √ √
	Sebutkan FA yang berperan! Catatan		
23.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dalam Program RASS ?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi (b) SDM (c) Prasarana dan sarana	√ √ √
	Sebutkan PD yang berperan! Catatan		
24.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam Program RASS?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi (b) SDM (c) Pendanaan (d) Prasarana dan sarana	√ √ √ √
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan		
25.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam Program RASS ?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi (b) SDM (c) Pendanaan (d) Prasarana dan sarana	√ √ √ √
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan		
26.	Apakah ada kemitraan dengan media massa dalam Program RASS?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pemberitaan/promosi (b) Pelatihan	√ √
	Sebutkan MM yang berperan! Catatan		
27.	Apakah ada mekanisme pemantauan terhadap keberadaan program, prasarana, dan sarana perjalanan anak ke dan dari sekolah?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Dinas Perhubungan (b) Polres	√ √
28.	Berapa angka kecelakaan lalu-lintas pada anak?	(a) Di bawah angka nasional (b) Di atas angka nasional (c) Tidak ada data	√ √

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
	Sebutkan angka anak korban kecelakaan lalu-lintas selama 2 tahun terakhir! (Jika 2018<2017; maka nilai:2)	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
29.	Apakah ada program inovasi Infrastruktur Ramah Anak? Jika Ya, apa bentuk inovasinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Produk (b) Metode (c) Teknologi	 √ √ √
IV. KLASSTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN			
11.	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Ukuran: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Persentase persalinan di fasilitas kesehatan, di atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun</i> • <i>Angka Kematian Bayi, di bawah angka nasional, dan menurun setiap tahun</i> • <i>Angka Kematian Ibu (AKI), di bawah angka nasional, dan menurun setiap tahun</i> 		
1.	Apakah tersedia peraturan/kebijakan daerah tentang persalinan di fasilitas kesehatan? Jika Ya, apa bentuknya? Jika Tidak, sebutkan alasannya? Catatan	(a) Ya (b) Tidak (a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota (a) Sudah ada kebijakan dari Kemenkes (b) Sudah ada kebijakan dari Gubernur (c) Sudah ada Surat Edaran dari Dinkes (d) Belum ada komitmen	√ √ √
2.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan persalinan di fasilitas kesehatan? Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) Ya (b) Tidak (a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	 √ √

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
3.	Berapa angka rata-rata persalinan di fasilitas kesehatan?	(a) Di atas angka nasional	√
		(b) Di bawah angka nasional	√
		(c) Tidak ada data	
	Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun 2017! (Jika 2018>2017; maka nilai:2)	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
4.	Berapa cakupan kepemilikan Buku KIA?	(a) > 75%	√
		(b) 50-75%	√
		(c) <50 %	√
		(d) Tidak ada data	
	Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun 2017! Catatan	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
5.	Berapa Angka Kematian Bayi?	(a) Di atas angka nasional	√
		(b) Di bawah angka nasional	√
		(c) Tidak ada data	
	Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun 2017! (Jika 2018>2017; maka nilai:2)	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
6.	Berapa Angka Kematian Ibu (AKI)?	(a) Di atas angka nasional	√
		(b) Di bawah angka nasional	√
		(c) Tidak ada data	
	Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun 2017! (Jika 2018>2017; maka nilai:2)	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
7.	Apakah SDM di fasilitas kesehatan telah dilatih KHA? Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya	
		(b) Tidak	
		(a) Pemda	√
		(b) Pusat	√
8.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dalam menangani persalinan di fasilitas kesehatan? Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya	
		(b) Tidak	
		(a) Penyebaran informasi	√
		(b) Mendukung sarpras	√
		(c) Pelatihan	√
		(d) Pemberdayaan masyarakat	√
		(e) Mengaktifkan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	√
(f) Pemberian rujukan	√		
	Sebutkan PD yang berperan! Catatan		
9.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam menangani persalinan di fasilitas kesehatan? Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya	
		(b) Tidak	
		(a) Penyebaran informasi	√
		(b) Mendukung sarpras	√
		(c) Pelatihan	√
		(d) Pemberdayaan masyarakat/pendampingan	√

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan		
10.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam menangani persalinan di fasilitas kesehatan?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi (b) Mendukung sarpras (c) Pelatihan/pemberdayaan masyarakat	√ √ √
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan		
11.	Apakah ada kemitraan dengan media massa dalam menangani persalinan di fasilitas kesehatan?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi (b) Mendukung sarpras	√ √
	Sebutkan MM yang berperan! Catatan		
12.	Apakah ada program inovasi agar ibu hamil melakukan persalinan di fasilitas kesehatan?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk inovasinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Produk (b) Metode (c) Teknologi	√ √ √
12.	Prevalensi Status Gizi Balita Ukuran: • Prevalensi gizi kurang, gizi lebih, pendek dan kurus, di bawah angka nasional, dan menurun setiap tahun		
1.	Apakah tersedia kebijakan/peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan masalah gizi kurang, gizi lebih, pendek, dan kurus?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√ √
	Jika Tidak, sebutkan alasannya?	(a) Sudah ada kebijakan dari Kemkes (b) Sudah ada kebijakan dari Gubernur (c) Sudah ada Surat Edaran dari Dinkes (d) Belum ada komitmen	
2.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan pencegahan dan penanganan	(a) Ya (b) Tidak	

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
	masalah gizi?		
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	√ √
3.	Berapa persentase kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita?	(a) Di atas angka nasional (b) Di bawah angka nasional (c) Tidak ada data	√ √
	Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun 2017! (Jika 2018<2017; maka nilai:2)	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
4.	Berapa persentase anak balita dengan masalah gizi lebih?	(a) Di atas angka nasional (b) Di bawah angka nasional (c) Tidak ada data	√ √
	Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun 2017! (Jika 2018<2017; maka nilai:2)	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
5.	Berapa prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah 2 tahun?	(a) Di atas angka nasional (b) Di bawah angka nasional (c) Tidak ada data	√ √
	Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun 2017! (Jika 2018<2017; maka nilai:2)	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
6.	Apakah ada mekanisme penanganan masalah gizi? Jika Ya, sebutkan mekanismenya! Catatan	(a) Ya (b) Tidak ...	√
7.	Apakah ada SDM penyelenggara pencegahan dan penanganan masalah gizi dilatih KHA? Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Pemda (b) Pusat	√ √
8.	Apakah ada keikutsertaan Forum Anak/kelompok anak dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi? Jika Ya, apa bentuk keikutsertaannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Penyebarluasan informasi tentang gizi (Pelopor) (b) Melaporkan ke pihak terkait jika ada anak dengan masalah gizi (Pelapor)	√ √
	Sebutkan FA yang berperan! Catatan		
9.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi? Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Penyebaran informasi (b) Pelatihan/pendampingan	√ √

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
		(c) Pemberdayaan masyarakat	√
		(d) Penyediaan Ruang ASI	√
		(e) Promosi Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) lokal bergizi	√
		(f) Pemberian suplemen gizi	√
		(g) Pemberian formula gizi buruk	√
		(h) Pengembangan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB)	√
	Sebutkan PD yang berperan! Catatan		
10.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi (b) Penyediaan suplemen gizi dan formula gizi buruk (c) Promosi Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) lokal bergizi (d) Pelatihan, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat (e) Pemberian Makanan Tambahan (f) Pengembangan Kelompok Pendukung ASI	√ √ √ √ √ √
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan		
11.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi (b) Penyediaan suplemen gizi dan formula gizi buruk (c) Pelatihan (d) Pemberian makanan tambahan (e) Pengembangan Ruang ASI (f) Melaksanakan tata laksana gizi buruk (g) Promosi Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) lokal bergizi	√ √ √ √ √ √ √
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan		
12.	Apakah ada kemitraan media massa dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi (b) Mendukung sarpras	√ √

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
	Sebutkan MM yang berperan! Catatan		
13.	Apakah ada program inovasi pencegahan dan penanganan masalah gizi ?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk inovasinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Produk (b) Metode (c) Teknologi	√ √ √
14.	Apakah ada Desa Pangan Aman?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Tidak, sebutkan alasannya?	(a) Belum tersosialisasi (b) Belum memenuhi persyaratan Desa Pangan Aman (c) Belum ada komitmen	√ √ √
13.	Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun Ukuran: • Di atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun		
1.	Apakah tersedia kebijakan/peraturan daerah tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD), ASI Eksklusif pada bayi usia di bawah 6 bulan, Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat mulai usia 6 bulan, dan ASI diteruskan sampai usia 2 tahun atau lebih?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√ √
	Jika Tidak, sebutkan alasannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sudah ada kebijakan dari Kemkes (b) Sudah ada kebijakan dari Gubernur (c) Sudah ada Surat Edaran dari Dinkes (d) Belum ada komitmen	
2.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan PMBA usia di bawah 2 tahun?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) APBD > APBN (b) APBD < APBN (c) Swasta/masyarakat	√ √

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
3.	Persentase ASI Eksklusif pada bayi usia di bawah 6 bulan?	(a) Di atas angka nasional	√
		(b) Di bawah angka nasional	√
		(c) Tidak ada data	
	Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun 2017! (Jika 2018>2017; maka nilai:2)	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
4.	Persentase IMD pada anak usia di bawah 2 tahun?	(a) Di atas angka nasional	√
		(b) Di bawah angka nasional	√
		(c) Tidak ada data	
	Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun 2017! (Jika 2018>2017; maka nilai:2)	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
5.	Persentase anak usia 6-23 bulan yang menerima MP-ASI?	(a) Di atas angka nasional	√
		(b) Di bawah angka nasional	√
		(c) Tidak ada data	
	Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun 2017! (Jika 2018>2017; maka nilai:2)	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
6.	Persentase anak yang masih mendapatkan ASI pada usia 2 tahun?	(a) Di atas angka nasional	√
		(b) Di bawah angka nasional	√
		(c) Tidak ada data	
	Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun 2017! (Jika 2018>2017; maka nilai:2)	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
7.	Persentase Ruang ASI yang tersebar di fasilitas kantor?	(a) Di atas 50%	√
		(b) Di bawah 50%	√
		(c) Tidak ada data	
	Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun 2017! (Jika 2018<2017; maka nilai:2)	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
8.	Persentase Ruang ASI yang tersebar di fasilitas umum?	(a) Di atas 50%	√
		(b) Di bawah 50%	√
		(c) Tidak ada data	
	Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun 2017! (Jika 2018>2017; maka nilai:2)	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
9.	Persentase Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB)?	(a) Di atas 50%	√
		(b) Di bawah 50%	√
		(c) Tidak ada data	
	Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun 2017! (Jika 2018>2017; maka nilai:1)	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
10.	Apakah ada Konselor ASI di setiap desa/kelurahan?	(a) Ya	√
		(b) Tidak	
	Berapa jumlah Konselor ASI se-kabupaten/kota?	Tahun 2017: ...	
		Tahun 2018: ...	
11.	Apakah ada Kader/Konselor PMBA di setiap desa/kelurahan?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Berapa jumlah Kader/Konselor PMBA se-kabupaten/kota?	Tahun 2017: ...	
		Tahun 2018: ...	
Catatan			
12.	Apakah ada SDM penyelenggara peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun, dilatih KHA?	(a) Ya	
		(b) Tidak	

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
	Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pemda (b) Pusat (c) LSM/Perguruan Tinggi	√ √ √
13.	Apakah ada keikutsertaan Forum Anak/sejenisnya dalam kampanye pentingnya PMBA usia di bawah 2 tahun? Jika Ya, apa bentuk keikutsertaannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Menyebarluaskan informasi tentang ASI dan MPASI (b) Memberi masukan kepada pihak terkait	 √ √
	Sebutkan FA yang berperan! Catatan		
14.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun? Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Advokasi dan sosialisasi (b) Pelatihan teknis/konseling (c) Menyediakan tenaga konselor (d) Monitoring dan evaluasi (e) Melaksanakan litbang (f) KIE	 √ √ √ √ √ √
	Sebutkan PD yang berperan! Catatan		
15.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun? Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Penyebaran informasi (b) Mendukung sarpras (c) Pelatihan (d) Pemberdayaan masyarakat (e) Mengembangkan kelompok Pendukung PMBA (f) Advokasi terlaksananya IMD di fasilitas layanan kesehatan	 √ √ √ √ √ √
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan		
16.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun? Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Penyebaran informasi (b) Mendukung sarpras (c) Pelatihan petugas (d) Pemberdayaan masyarakat (e) Mengembangkan Ruang ASI (f) Memfasilitasi RSSIB	 √ √ √ √ √ √

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan		
17.	Apakah ada kemitraan dengan media massa dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi (b) Mendukung sarpras (c) Pelatihan	√ √ √
	Sebutkan MM yang berperan! Catatan		
18.	Apakah ada program inovasi dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk inovasinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Produk (b) Metode (c) Teknologi	√ √ √
14.	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak Ukuran: • Meningkat setiap tahun		
1.	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√ √
	Jika Tidak, jelaskan mengapa? Catatan	(a) Sudah ada kebijakan dari Kemkes (b) Sudah ada kebijakan dari Gubernur (c) Sudah ada Surat Edaran dari Dinkes (d) Belum ada komitmen	
2.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan pengembangan Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) APBD > ABPN (b) APBD < APBN	√ √
3.	Berapa jumlah Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak?	(a) > 4 Puskesmas (b) < 4 Puskesmas (c) Belum ada	√ √
	Sebutkan jumlah Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak! (Jika 2018>2017; maka nilai:2)	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
	Jika belum ada, jelaskan mengapa? Catatan	(a) Belum disosialisasi (b) Belum ada sarpras (c) Belum ada komitmen	

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
4.	Berapa jumlah Rumah Sakit dengan Pelayanan Ramah Anak?	(a) 1 rumah sakit atau lebih (b) Belum ada	√
	Sebutkan jumlah RS dengan Pelayanan Ramah Anak!	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
	(Jika 2018>2017; maka nilai:2)		
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	(a) Belum disosialisasi (b) Belum ada sarpras (c) Belum ada komitmen	
5.	Apakah SDM Puskesmas telah dilatih KHA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pemda (b) Pusat (c) LSM/Perguruan Tinggi	√ √ √
6.	Apakah SDM Rumah Sakit telah dilatih KHA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pemda (b) Pusat (c) LSM/Perguruan Tinggi	√ √ √
7.	Apakah ada keikutsertaan Forum Anak/kelompok anak dalam pengembangan Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk keikutsertaan mereka? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (b) Memberi masukan dalam rangka pelayanan ramah anak	√ √
	Sebutkan FA yang berperan! Catatan		
8.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi (b) Mendukung sarpras (c) Pelatihan petugas (d) Menyediakan Ruang ASI	√ √ √ √
	Sebutkan PD yang berperan! Catatan		
9.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak ?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi (b) Mendukung sarpras (c) Pelatihan petugas	√ √ √
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan		

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran	
10.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak ?	(a) Ya (b) Tidak		
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi (b) Mendukung sarpras (c) Pelatihan petugas (d) Menyediakan Ruang ASI	√ √ √ √	
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan			
	11.	Apakah ada kemitraan dengan media massa dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak ?	(a) Ya (b) Tidak	
		Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi (b) Mendukung sarpras	√ √
Sebutkan MM yang berperan! Catatan				
12.	Apakah ada program inovasi dalam pengembangan Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak?	(a) Ya (b) Tidak		
	Jika Ya, apa bentuk inovasinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Produk (b) Metode (c) Teknologi	√ √ √	
15.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak Ukuran: • Di atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun			
1.	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang peningkatan rumah tangga dengan akses air minum?	(a) Ya (b) Tidak		
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√ √	
	Jika Tidak, jelaskan mengapa?	(a) Sudah ada peraturan dari Kemenkes dan Kemen PUPR (b) Belum ada komitmen	√	
2.	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang peningkatan rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak?	(a) Ya (b) Tidak		

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√ √
	Jika Tidak, jelaskan mengapa?	(a) Sudah ada peraturan dari Kemenkes dan Kemen PUPR (b) Belum ada komitmen	√
3.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	√ √
4.	Apakah rumah tangga sudah memperoleh akses air minum dari PDAM?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, sebutkan persentasenya selama 2 tahun terakhir! (Jika 2018>2017; maka nilai:2)	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
	Jika Tidak, darimanakah sumber airnya?	(a) Sumur timba/pipa (b) Sambungan komunal (c) Mata air setempat	√ √ √
5.	Berapa persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak?	(a) Di atas angka nasional (b) Di bawah angka nasional (c) Tidak ada data	√ √
	Sebutkan angkanya selama 2 tahun terakhir! (Jika 2018>2017; maka nilai:2)	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
6.	Apakah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses penyediaan air minum di rumah tangga?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, sebutkan upaya dimaksud? <i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(a) Penyuluhan ke rumah tangga (b) Memperluas akses mendapatkan air bersih (c) Pemberdayaan masyarakat untuk mendapat air bersih secara swadaya	√ √ √
7.	Apakah sudah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum yang aman di skala rumah tangga untuk mencegah rekontaminasi (PAMRT)	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, sebutkan upaya dimaksud? <i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(a) Penyuluhan ke rumah tangga (b) Penyuluhan di Puskesmas/Posyandu	√ √

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
8.	Apakah semua rumah tangga sudah memiliki sarana sanitasi yang layak (jamban, penampungan yang aman, dan jarak penampungan limbah rumah tangga ke sumber air yang aman)?	(a) Ya (b) Tidak	√
	Jika Tidak, sebutkan persentasenya selama 2 tahun terakhir!	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
	(Jika 2018<2017; maka nilai:2)		
	Di mana biasanya anggota keluarga membuang air kecil dan/atau air besar?	(a) Toilet umum/bersama/MCK (b) Sungai/balong (c) Lahan dan ditimbun	√ √ √
9.	Apakah ada keikutsertaan Forum Anak/kelompok anak dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk keikutsertaannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	a) Penyebaran informasi b) Memberi masukan pihak terkait c) Lomba-lomba terkait air minum dan sanitasi	√ √ √
	Sebutkan FA yang berperan! Catatan		
10.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga?	a) Ya b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	a) Penyebaran informasi/penyuluhan b) Pelatihan/pemberdayaan masyarakat	√ √
	Sebutkan PD yang berperan! Catatan		
11.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi (b) Pelatihan/pemberdayaan masyarakat	√ √
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan		
12.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi (b) Pelatihan petugas (c) Pemberdayaan masyarakat (d) Menyediakan sarpras	√ √ √ √

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan		
13.	Apakah ada kemitraan dengan media massa dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi (b) Pelatihan	√ √
	Sebutkan MM yang berperan! Catatan		
14.	Apakah ada program inovasi penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk inovasinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Produk (b) Metode (c) Teknologi	√ √ √
16.	Tersedia Kawasan Tanpa Rokok Ukuran: <ul style="list-style-type: none"> • Semua fasilitas umum dan tempat di mana anak banyak berkumpul, bebas asap rokok • Tidak ada iklan rokok, di tempat publik di mana anak banyak berkumpul 		
1.	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang penyediaan kawasan tanpa rokok?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√ √
	Jika Tidak, jelaskan mengapa?	(a) Sudah ada kebijakan dari K/L terkait (b) Sudah ada kebijakan dari Gubernur (c) Sudah ada Surat Edaran dari Kadinkes (d) Belum ada komitmen	
2.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan kawasan tanpa rokok?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	√ √
3.	Persentase kawasan tanpa rokok di fasilitas kesehatan?	(a) Di atas 90% (b) Di bawah 90% (c) Tidak ada data	√ √

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
	Sebutkan angkanya selama 2 tahun terakhir! (Jika 2018>2017; maka nilai:2)	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
4.	Persentase kawasan tanpa rokok di fasilitas pendidikan?	(a) Di atas 90% (b) Di bawah 90% (c) Tidak ada data	√ √
	Sebutkan angkanya selama 2 tahun terakhir! (Jika 2018>2017; maka nilai:2)	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
5.	Persentase penyediaan kawasan tanpa rokok di fasilitas tempat umum?	(a) Di atas 50% (b) Di bawah 50% (c) Tidak ada data	√ √
	Sebutkan angkanya selama 2 tahun terakhir! (Jika 2018>2017; maka nilai:2)	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
6.	Persentase penyediaan kawasan tanpa rokok di fasilitas tempat anak bermain?	(a) Di atas 90% (b) Di bawah 90% (c) Tidak ada data	√ √
	Sebutkan angkanya selama 2 tahun terakhir! (Jika 2018>2017; maka nilai:2)	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
7.	Apakah di semua fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat umum, tempat anak bermain, alun-alun, bebas iklan rokok?	(a) Ya (b) Tidak	√
8.	Apakah ada lembaga pengawas kawasan tanpa rokok?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, sebutkan lembaganya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Satpol PP (b) Tim khusus pengawas KTR (c) Forum Anak	√ √ √
9.	Apakah ada keikutsertaan Forum Anak/kelompok anak terkait kawasan tanpa rokok?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk keikutsertaannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Kampanye anti rokok (b) Sosialisasi kelompok sebaya	√ √
	Sebutkan FA yang berperan! Catatan		
10.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pengelolaan kawasan tanpa rokok?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi (b) Mendukung sarpras	√ √
	Sebutkan PD yang berperan! Catatan		
11.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam pengelolaan kawasan tanpa rokok?	(a) Ya (b) Tidak	

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi (b) Pelatihan (c) Mengembangkan KTR (d) Pemantauan pelaksanaan KTR	√ √ √ √
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan		
12.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam pengelolaan kawasan tanpa rokok?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi (b) Mengembangkan KTR	√ √
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan		
13.	Apakah ada kemitraan dengan media massa dalam pengelolaan kawasan tanpa rokok?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi pencegahan/larangan rokok (b) Pelatihan	√ √
	Sebutkan MM yang berperan! Catatan		
14.	Apakah ada program inovasi pengelolaan kawasan tanpa rokok?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk inovasinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Produk (b) Metode (c) Teknologi	√ √ √
V. KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA			
17.	Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI) Ukuran: • <i>Meningkat setiap tahun</i> • <i>Minimal 1 PAUD-HI di setiap desa/kelurahan</i>		
1.	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang PAUD-HI? Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Ya (b) Tidak (a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√ √
2.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait PAUD-HI?	(a) Ya (b) Tidak	

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	√ √
3.	Apakah setiap desa/kelurahan memiliki PAUD-HI?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, berapa persentasenya?	(a) > 25% (b) < 25%	√ √
	Sebutkan jumlah desa/kelurahan yang telah memiliki PAUD-HI selama 2 tahun terakhir! (Jika 2018>2017; maka nilai:5)	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
4.	Apakah SDM pelayanan PAUD-HI dilatih KHA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya? <i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(a) Pemda (b) Pusat (c) Lainnya	√ √ √
5.	Selain dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan BKKBN, apakah ada kemitraan dengan Perangkat Daerah lain dalam pelayanan PAUD-HI? Sebutkan PD tersebut! Catatan	(a) Ya (b) Tidak	
6.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam pelayanan PAUD-HI?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? <i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(a) SDM (b) Pendanaan (c) Bimbingan teknis (d) Sarana/prasarana	√ √ √ √
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan		
7.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam pelayanan PAUD-HI?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? <i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(a) Program (b) Pendanaan (c) Sarana/prasarana	√ √ √
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan		
8.	Apakah ada kemitraan dengan media massa dalam pelayanan PAUD-HI?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? <i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(a) Pemberitaan (b) Program (c) Pendanaan	√ √ √
	Sebutkan MM yang berperan! Catatan		
9.	Apakah ada program inovasi pengembangan PAUD-HI?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? <i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(a) Produk (b) Metode (c) Teknologi	√ √ √

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
18.	<p>Persentase Wajib Belajar 12 Tahun</p> <p>Ukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% untuk anak perempuan dan anak laki-laki 		
1.	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang Program Wajib Belajar 12 Tahun?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√ √
2.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan Program Wajib Belajar 12 Tahun?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	√ √
3.	Apakah SDM penyelenggara Program Wajib Belajar 12 Tahun (Guru dan Tenaga Kependidikan) dilatih KHA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pemda (b) Pusat	√ √
4.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dalam Program Wajib Belajar 12 Tahun?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Program (b) Bimbingan teknis	√ √
	Sebutkan PD yang berperan! Catatan		
5.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam mewujudkan Program Wajib Belajar 12 Tahun?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Program (b) Anggaran (c) Bimbingan teknis	√ √ √
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan		
6.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam mewujudkan Program Wajib Belajar 12 Tahun?	(a) Ya (b) Tidak	

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
	Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? (bisa lebih dari 1 jawaban) Sebutkan DU yang berperan! Catatan	(a) Program (c) Anggaran (c) Bimbingan teknis	√ √ √
7.	Apakah ada kemitraan dengan media massa dalam penyebar luasan Program Wajib Belajar 12 Tahun? Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? (bisa lebih dari 1 jawaban) Sebutkan MM yang berperan! Catatan	(a) Ya (b) Tidak (a) Program (b) Anggaran (c) Promosi	 √ √ √
8.	Apakah ada inovasi untuk mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun? Jika Ya, apa bentuk inovasinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Produk (b) Metode (c) Teknologi	 √ √ √
9.	Berapa angka rata-rata lama sekolah?	Tahun 2017: ... Tahun 2018: ...	
19.	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) Ukuran: <ul style="list-style-type: none"> • Meningkat setiap tahun untuk setiap jenjang pendidikan • Minimal 4 SRA (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar 		
1.	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang SRA? Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Ya (b) Tidak (a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	 √ √
2.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan Sekolah Ramah Anak? Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) Ya (b) Tidak (a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	 √ √
3.	Berapa jumlah SRA tingkat SD/MI dan SMP/MTs yang sudah mempunyai SK dari Dinas terkait (Kepala Daerah, Pendidikan, Agama, PP-PA) selama 2 tahun terakhir? (Jika 2018>2017; maka nilai:5)	Tahun 2017: SD/MI/ sederajat: ... SMP/MTs/ sederajat: Tahun 2018: SD/MI/ sederajat: ... SMP/MTs/ sederajat:	√ √

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
4.	Berapa persentase Sekolah Inklusi yang sudah mempunyai SK?	(a) <25%	√
		(b) ≥25%	√
	Berapa persentase Sekolah Inklusi yang belum mempunyai SK tetapi mempunyai anak penyandang disabilitas? Catatan	...%	
5.	Berapa persentase Sekolah yang mengembangkan program penyehatan lingkungan sekolah/penghijauan?	(a) <25%	√
		(b) ≥25%	√
6.	Berapa persentase Sekolah yang mempunyai program hak anak atas kesehatan terkait makanan dan kantin sekolah (misalnya: Kantin Sehat dan atau Pangan Jajan Sehat, dll)?	(a) <25%	√
		(b) ≥25%	√
	Berapa persentase Sekolah yang mempunyai program Kantin Sehat yang mempunyai sertifikat laik sehat? Catatan	...%	
7.	Berapa persentase Sekolah yang mempunyai program hak anak atas kesehatan terkait (misalnya: UKS dan PHBS, dll)?	(a) <25%	√
		(b) ≥25%	√
8.	Berapa persentase Sekolah yang mempunyai program sebagai Kawasan Tanpa Rokok?	(a) <90%	√
		(b) ≥90%	√
9.	Berapa persentase Sekolah yang mempunyai program Kawasan Tanpa Napza?	(a) <25%	√
		(b) ≥25%	√
10.	Berapa persentase Sekolah yang mempunyai program Aman dari Bencana?	(a) <25%	√
		(b) ≥25%	√
	Berapakah persentase Sekolah yang mempunyai standar bangunan ramah anak? Catatan	...%	
11.	Berapa persentase Sekolah yang mempunyai kebijakan anti kekerasan di sekolah?	(a) <25%	√
		(b) ≥25%	√
12.	Berapa persentase Sekolah yang mempunyai tata tertib sekolah yang dibuat bersama-sama dengan murid?	(a) <25%	√
		(b) ≥25%	√
13.	Berapa persentase Sekolah yang mempunyai group komunikasi antara sekolah dan orang tua?	(a) <25%	√
		(b) ≥25%	√
14.	Berapa persentase Sekolah yang mempunyai sistem pengaduan untuk penanganan kasus di sekolah?	(a) <25%	√
		(b) ≥25%	√
		(c) Tidak ada	

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
15.	Apakah SDM pengelola Sekolah Ramah Anak (Guru dan Tenaga Kependidikan) dilatih KHA?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, siapa penyelenggaranya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pusat	√
		(b) Pemda	√
16.	Apakah ada keikutsertaan Forum Anak/kelompok anak dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk keikutsertaannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pelopor	√
		(b) Pelapor	√
	Sebutkan FA yang berperan! Catatan		
17.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pengembangan SRA?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Program	√
		(b) Bimbingan teknis	√
		(c) Pengawasan/ pendampingan	√
	Sebutkan PD yang berperan! Catatan		
18.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam pengembangan SRA?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Program	√
		(b) Pendanaan	√
		(c) Bimbingan teknis	√
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan		
19.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam pengembangan SRA?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Program	√
		(b) Pendanaan	√
		(c) Bimbingan teknis	√
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan		
20.	Apakah ada kemitraan dengan media massa dalam pengembangan SRA?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Program	√
		(b) Pendanaan	√
		(c) Bimbingan teknis	√
	Sebutkan MM yang berperan! Catatan		
21.	Apakah ada pemantauan dan evaluasi terhadap SRA?	(a) Ya	
	(b) Tidak		
22.	Dibanding tahun sebelumnya apakah persentase SRA meningkat?	(a) Ya	√
		(b) Tidak	

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
	Sebutkan angkanya selama 2 tahun terakhir! (Jika 2018>2017, maka nilai: 5)	Tahun 2017: ...% Tahun 2018: ...%	
23.	Apakah ada program inovasi pengembangan SRA? Jika Ya, apa bentuk inovasinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Produk (b) Metode (c) Teknologi	 √ √ √
20.	Tersedia Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak Ukuran: <ul style="list-style-type: none"> • Ada, dapat diakses semua anak, tidak berbayar, dan meningkat setiap tahun • Minimal 1 Pusat Kreativitas Anak (PKA) • Kegiatan pengembangan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak meningkat setiap tahun 		
1.	Apakah ada kebijakan daerah tentang kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak? Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Ya (b) Tidak (a) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota (b) Lainnya	 √ √
2.	Apakah ada anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan pengelolaan kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak? Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) Ya (b) Tidak (a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	 √ √
3.	Berapa jumlah Pusat Kreatifitas Anak (PKA) yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Pariwisata/Dinas PPPA)? (Jika 2018>2017; maka nilai:3)	Tahun 2017: ... PKA Tahun 2018: ... PKA	
4.	Apakah PKA dapat diakses semua anak, termasuk anak penyandang disabilitas?	(a) Ya (b) Tidak	

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
5.	Apakah PKA tidak berbayar (gratis)?	(a) Ya (b) Tidak	
6.	Apakah ada lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak? Jika Ya, sebutkan lembaganya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Dewan Pendidikan (b) Lembaga Perlindungan Anak (c) Lainnya	 √ √ √
7.	Apakah SDM pengelola kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak dilatih tentang KHA? Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Pemda (b) Pusat (c) Lainnya	 √ √ √
8.	Apakah ada keikutsertaan Forum Anak/kelompok anak dalam mewujudkan PKA? Jika Ya, apa bentuk keikutsertaannya? (bisa lebih dari 1 jawaban) Sebutkan FA yang berperan! Catatan	(a) Ya (b) Tidak (a) Pelopor (b) Pelapor	 √ √
9.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak? Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? (bisa lebih dari 1 jawaban) Sebutkan PD yang berperan! Catatan	(a) Ya (b) Tidak (a) Program (b) Bimbingan teknis	 √ √
10.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak? Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? (bisa lebih dari 1 jawaban) Sebutkan LM yang berperan! Catatan	(a) Ya (b) Tidak (a) Anggaran (b) Program (c) Bimbingan teknis	 √ √ √
11.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak? Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Anggaran (b) Program	 √ √

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan		
12.	Apakah ada kemitraan dengan media massa dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Anggaran (b) Program	√ √
	Sebutkan MM yang berperan! Catatan		
13.	Apakah ada program inovasi dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk inovasinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Produk (b) Metode (c) Teknologi	√ √ √
VI.	KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS		
21.a.	Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran yang Terlayani Ukuran: • 100%		
1.	Apakah tersedia peraturan/kebijakan daerah tentang penanganan anak korban kekerasan?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi Surat Edaran Bupati/Walikota	√ √
2.	Apakah tersedia peraturan/kebijakan daerah tentang penanganan anak korban penelantaran?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√ √
3.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tentang pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	√ √

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
4.	Apakah tersedia lembaga layanan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, sebutkan jumlah dan nama lembaga layanan tersebut? Jika > 4 layanan, maka nilai: 2 Jika < 4 layanan, maka nilai: 1	(a) P2TP2A/sejenisnya (b) Puskesmas Mampu Tatalaksana Penanganan Kekerasan terhadap Anak (c) UPPA (d) Rumah Aman (e) PPT (f) Shelter (g) RPSA (h) Lainnya	√ √ √ √ √ √ √ √
5.	Apakah ada mekanisme rujukan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran?	(a) Ya (b) Tidak	√
6.	Apakah ada mekanisme monitoring terhadap anak korban kekerasan dan penelantaran dan keluarganya pasca penanganan?	(a) Ya (b) Tidak	√
7.	Apakah ada sistem pencatatan dan pelaporan anak korban kekerasan dan penelantaran?	(a) Ya (b) Tidak	√
8.	Apakah sistem pencatatan dan pelaporan anak korban kekerasan, sudah terintegrasi dengan sistem informasi on-line perlindungan perempuan dan perlindungan anak (SIMFONI PPA)?	(a) Ya (b) Tidak	√
9.	Apakah semua anak korban kekerasan dan penelantaran mendapatkan layanan? Jika Ya, sebutkan jumlahnya!	(a) Ya (b) Tidak (a) anak yang melaporkan (b)anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan (c) anak yang mendapatkan layanan sosial (d) anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum (e) anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial dan pemulihan	√ √ √ √ √
10.	Apakah ada SDM terlatih penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran? Jika Ya, sebutkan jenis pelatihannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) KHA (b) Sistem pencatatan dan pelaporan	√ √

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
		(c) Psikososial	√
		(d) Manajemen kasus	√
11.	Apakah ada psikolog dan psikiater di lembaga layanan?	(a) Ya (b) Tidak	
12.	Apakah ada peran Forum Anak/kelompok anak dalam pencegahan kekerasan dan penelantaran?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Kampanye (b) Penyuluhan (c) Pelatihan teman sebaya (d) Pelapor	√ √ √ √
13.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Layanan (b) Anggaran (c) SDM (d) Sarana dan prasarana	√ √ √ √
14.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) PATBM/sejenisnya (b) Layanan (c) Program (d) Anggaran (e) SDM (f) Sarana dan prasarana	√ √ √ √ √ √
15.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Layanan (b) Program (c) Anggaran (d) SDM (e) Sarana dan prasarana	√ √ √ √ √
16.	Apakah ada kemitraan dengan media massa dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Anggaran (b) Pemberitaan	√ √
17.	Apakah ada program inovasi untuk pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Produk (b) Metode (c) Teknologi	√ √ √

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
21.b.	<p>Persentase Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)</p> <p>Ukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% 		
1.	Apakah ada peraturan tentang pencegahan dan penanganan PA dan BPTA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√ √
2.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan pencegahan dan penanganan PA dan BPTA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	√ √
3.	Apakah tersedia lembaga layanan bagi anak yang ditarik dari pekerjaan terburuk?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, sebutkan jumlah dan nama lembaga layanan tersebut? Catatan	(a) P2TP2A/sejenisnya (b) Puskesmas Mampu Tatalaksana Penanganan Kekerasan terhadap Anak (c) UPPA (d) PPT (e) Shelter (f) Rumah Aman (g) RPSA (h) Lainnya	√ √ √ √ √ √ √
4.	Apakah ada SOP pencegahan dan penarikan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk?	(a) Ya (b) Tidak	√
5.	Apakah ada mekanisme pemantauan terhadap anak korban eksploitasi dan anak yang telah ditarik dari pekerjaan terburuk?	(a) Ya (b) Tidak	√
6.	Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak, anak bekerja dan anak yang ditarik dari BPTA?	(a) Ya (b) Tidak	√
	Jika Ya, lembaga apa yang melakukan? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pengawasan Tenaga Kerja (b) Dinas Tenaga Kerja (c) LSM Anak (d) Lainnya	√ √ √ √

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
7.	Apakah ada peran Forum Anak/kelompok anak dalam pencegahan pekerja anak?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Kampanye	√
		(b) Penyuluhan	√
8.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pencegahan dan penarikan anak yang bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Layanan	√
		(b) Program	√
		(c) Anggaran	√
		(d) SDM	√
		(e) Sarana dan prasarana	√
(f) Lainnya	√		
9.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam pencegahan dan penanganan pekerja anak?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) PATBM/sejenisnya	√
		(b) Layanan	√
		(c) Program	√
		(d) Anggaran	√
		(e) SDM	√
(f) Sarana dan prasarana	√		
10.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam pencegahan dan penarikan anak yang bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Kebijakan perusahaan	√
		(b) Produk	√
		(c) Program (CSR)	√
(d) Lainnya	√		
11.	Apakah ada kemitraan dengan media massa dalam pencegahan anak yang bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pendanaan	√
12.	Apakah ada anak yang terlibat di dalam BPTA?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, layanan apa yang diperoleh anak yang ditarik dari BPTA? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Akta kelahiran	√
		(b) Pendidikan	√
		(c) Kesehatan	√
		(d) Jaminan Sosial	√
(e) Lainnya	√		
13.	Apakah ada program inovasi untuk pencegahan dan penanganan pekerja anak?	(a) Ya	
		(b) Tidak	

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
	Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Produk (b) Metode (c) Teknologi	√ √ √
22.a.	Anak Korban Pornografi, NAPZA dan Terinfeksi HIV/AIDS yang Terlayani Ukuran: • 100%		
1.	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang pencegahan dan penanganan anak korban pornografi? Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Ya (b) Tidak (a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan Instruksi/ Surat Edaran Bupati/Walikota	 √ √
2.	Apakah ada peraturan tentang pencegahan dan penanganan anak korban penyalahgunaan NAPZA? Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Ya (b) Tidak (a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/ Surat Edaran Bupati/Walikota	 √ √
3.	Apakah ada peraturan tentang pencegahan dan penanganan anak terinfeksi HIV/AIDS? Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Ya (b) Tidak (a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	 √ √
4.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tentang pencegahan dan penanganan anak korban pornografi? Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) Ya (b) Tidak (a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	 √ √
5.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan peraturan perundangan/kebijakan/program/kegiatan tentang pencegahan dan penanganan anak korban penyalahgunaan NAPZA?	(a) Ya (b) Tidak	

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	√ √
6.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tentang pencegahan dan penanganan anak terinfeksi HIV/AIDS?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	√ √
7.	Apakah tersedia lembaga layanan bagi anak korban pornografi?	(a) Ya (b) Tidak	√
	Jika Ya, sebutkan jumlah dan nama lembaga layanan tersebut? Catatan	(a) P2TP2A/sejenisnya (b) Puskesmas Mampu Tatalaksana Penanganan Kekerasan terhadap Anak (c) UPPA (d) PPT (e) Shelter (f) Rumah Aman (g) RPSA (g) Lainnya	√ √ √ √ √ √ √ √
8.	Apakah tersedia lembaga layanan bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA?	(a) Ya (b) Tidak	√
	Jika Ya, sebutkan jumlah dan nama lembaga layanan tersebut? Catatan	(a) P2TP2A/sejenisnya (b) Puskesmas Mampu Tatalaksana Penanganan Kekerasa terhadap Anak (c) UPPA (d) PPT (e) Shelter (f) Rumah Aman (g) RPSA (h) BNN daerah (i) Lainnya	
9.	Apakah tersedia lembaga layanan bagi anak terinfeksi HIV/AIDS?	(a) Ya (b) Tidak	√
	Jika Ya, sebutkan jumlah dan nama lembaga layanan tersebut? atatan	(a) P2TP2A/sejenisnya (b) Puskesmas Mampu Penanganan Kekerasa terhadap Anak (c) UPPA (d) PPT (e) Shelter (f) Rumah Aman (g) RPSA (h) BNN daerah (i) Lainnya	
10.	Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan anak korban pornografi?	(a) Ya (b) Tidak	√

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
11.	Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan anak korban NAPZA?	(a) Ya (b) Tidak	√
12.	Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan anak terinfeksi HIV/AIDS?	(a) Ya (b) Tidak	√
13.	Apakah semua anak korban pornografi terlayani?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, berapa jumlahnya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) anak dan orangtua yang melaporkan	√
		(b)anak yang mendapatkan layanan kesehatan	√
		(c) anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	√
		(d) anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum	√
		(e) anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial dan pemulangan	√
14.	Apakah semua anak korban penyalahgunaan NAPZA terlayani?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, berapa jumlahnya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) anak dan orangtua yang melaporkan	√
		(b)anak yang mendapatkan layanan kesehatan	√
		(c) anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	√
		(d) anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum	√
		(e) anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial dan pemulangan	√
15.	Apakah semua anak terinfeksi HIV/AIDS terlayani?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, berapa jumlahnya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) anak dan orangtua yang melaporkan	√
		(b)anak yang mendapatkan layanan kesehatan	√
		(c) ... anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	√

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
		(d) anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum	√
		(e) anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial dan pemulangan	√
16.	Apakah ada SDM terlatih penanganan anak korban pornografi?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa jenis pelatihannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) KHA (b) Sistem pencatatan dan pelaporan (c) Psikososial (d) Manajemen kasus	√ √ √ √
17.	Apakah ada SDM terlatih penanganan anak korban penyalahgunaan NAPZA ?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa jenis pelatihannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) KHA (b) Sistem pencatatan dan pelaporan (c) Psikososial (d) Manajemen kasus	√ √ √ √
18.	Apakah ada SDM terlatih penanganan anak terinfeksi HIV/AIDS?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa jenis pelatihannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) KHA (b) Sistem pencatatan dan pelaporan (c) Psikososial (d) Manajemen kasus	√ √ √ √
19.	Apakah ada psikolog dan psikiater di lembaga layanan anak korban pornografi?	(a) Ya (b) Tidak	√
20.	Apakah ada psikolog dan psikiater di lembaga layanan anak korban penyalahgunaan NAPZA?	(a) Ya (b) Tidak	√
21.	Apakah ada psikolog dan psikiater di lembaga layanan anak terinfeksi HIV/AIDS?	(a) Ya (b) Tidak	√
22.	Apakah ada peran Forum Anak/sejenisnya dalam pencegahan pornografi?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Kampanye (b) Penyuluhan (c) Pelatihan teman sebaya (d) Pengurangan risiko	√ √ √ √
23.	Apakah ada peran Forum Anak/kelompok anak dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA?	(a) Ya (b) Tidak	

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Kampanye (b) Penyuluhan (c) Pelatihan teman sebaya (d) Pengurangan risiko	√ √ √ √
24.	Apakah ada peran Forum Anak/kelompok anak dalam pencegahan HIV/AIDS? Jika Ya, sebutkan perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Kampanye (b) Penyuluhan (c) Pelatihan teman sebaya (d) Pengurangan risiko	 √ √ √ √
25.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS? Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Layanan (b) Program (c) Anggaran (d) SDM (e) Sarana dan prasarana	 √ √ √ √ √
26.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS? Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) PATBM/sejenisnya (b) Layanan (c) Program (d) Anggaran (e) SDM (f) Sarana dan prasarana (g) Layanan spesifik	 √ √ √ √ √ √ √
27.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS? Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Layanan (b) Program (c) Anggaran (d) SDM (e) Sarana dan prasarana	 √ √ √ √ √
28.	Apakah ada kemitraan dengan media massa dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS? Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Penggalangan dana (b) Tidak memberitakan anak korban (c) Ruang Konsultasi di media	 √ √ √

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
29.	Apakah ada program inovasi untuk pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV AIDS?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Produk	√
		(b) Metode	√
	(c) Teknologi	√	
22.b.	Anak korban bencana dan konflik yang terlayani Ukuran: • 100%		
1.	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang penanganan anak korban bencana? Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
		(a) Peraturan Daerah	√
		(b) Peraturan/Keputusan/Instruksi Surat Edaran Bupati/Walikota	√
2.	Apa ada peraturan/kebijakan daerah tentang anak korban konflik? Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
		(a) Peraturan Daerah	√
		(b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√
3.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tentang pencegahan dan penanganan anak korban bencana? Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
		(a) APBD > APBN	√
		(b) APBD < APBN	√
4.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan peraturan/kebijakan/program/kegiatan tentang penanganan anak korban konflik? Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
		(a) APBD > APBN	√
		(b) APBD < APBN	√
5.	Apakah tersedia lembaga layanan bagi anak korban bencana? Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya	
		(b) Tidak	
		(a) P2TP2A/sejenisnya	√
		(b) PPT	√
		(c) Shelter	√
		(d) RPSA	√
		(e) Tim Reaksi Cepat Bencana	√

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
6.	Apakah tersedia lembaga layanan bagi anak korban konflik?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) P2TP2A/sejenisnya (b) UPPA (c) PPT (d) Shelter (e) RPSA (f) Tim Reaksi Cepat	√ √ √ √ √ √
7.	Apakah tersedia fasilitas bagi anak korban bencana dan konflik yang sesuai kebutuhan dan kepentingan terbaik anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Shelter yang aman (b) Tenda yang melindungi anak (c) Toilet yang aman/sesuai usia anak (d) Makanan yang sesuai usia anak (e) Pengisian waktu luang bagi anak (f) Ketersediaan tenaga psikolog/peksos (g) <i>Trauma healing</i> /penguatan motivasi (k) Sandang (l) Fasilitas belajar	√ √ √ √ √ √ √ √ √
8.	Apakah tersedia <i>early warning system</i> bencana yang dipahami anak?	(a) Ya (b) Tidak	√
9.	Apakah tersedia jalur evakuasi ramah anak?	(a) Ya (b) Tidak	√
10.	Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan anak korban bencana?	(a) Ya (b) Tidak	√
11.	Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan anak korban konflik?	(a) Ya (b) Tidak	√
12.	Apakah semua anak korban bencana dan konflik terlayani?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, berapa jumlahnya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) anak dan orangtua yang melaporkan anak di pengungsian (b)anak yang mendapatkan layanan kesehatan (c) anak yang mendapatkan layanan sosial	√ √ √

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
		(d) anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum (terutama indikasi <i>trafficking</i> anak)	√
		(e) anak yang mendapatkan reintegrasi sosial dan pemulangan	√
		(f) Anak yang mendapatkan akses pendidikan (indikasi sekolah DO)	√
		(g)Layanan <i>home visit</i> pasca pengungsian	√
13.	Apakah ada SDM terlatih penanganan anak korban bencana?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, sebutkan jenis pelatihannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) KHA (b) Sistem pencatatan dan pelaporan (c) Psikososial (d) Manajemen kasus (e) <i>Trauma healing</i>	√ √ √ √ √
14.	Apakah ada SDM terlatih penanganan anak korban konflik?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, sebutkan jenis pelatihannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) KHA (b) Sistem pencatatan dan pelaporan (c) Psikososial (d) Manajemen kasus (e) Menumbuhkan rasa nyaman dan kondusif bagi anak	√ √ √ √ √
15.	Apakah ada psikolog dan psikiater di lembaga layanan korban bencana dan konflik?	(a) Ya (b) Tidak	√
16.	Apakah ada peran Forum Anak/kelompok anak dalam pencegahan konflik?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Kampanye (b) Penyuluhan (c) Pelatihan teman sebaya (d) Pengurangan resiko konflik (d) Mitigasi bencana	√ √ √ √ √
17.	Apakah ada peran Forum Anak/kelompok anak dalam pengelolaan risiko bencana?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) <i>Peer group</i> (b) Penyuluhan (c) <i>Trauma healing</i> teman sebaya	√ √ √

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
		(d) Pengurangan risiko bencana	√
		(e) Memberikan hiburan/motivasi	√
18.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Layanan	√
		(b) <i>Trauma healing</i>	√
		(c) Sandang	√
		(d) Pangan	√
		(f) SDM	√
		(g) Sarana dan prasarana	√
19.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) PATBM/sejenisnya	√
		(b) Layanan	√
		(c) Sandang	√
		(d) Pangan	√
		(e) <i>Trauma healing</i>	√
		(f) Anggaran	√
		(g) SDM	√
		(h) Sarana dan prasarana	√
		(i) Layanan spesifik	√
20.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha masyarakat tentang pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Layanan	√
		(b) <i>Trauma healing</i>	√
		(c) Sandang	√
		(d) Pangan	√
		(e) Anggaran	√
		(f) SDM	√
		(g) Sarana dan prasarana	√
21.	Apakah ada kemitraan dengan media massa dalam pencegahan dan penanganan anak korban Bencana, konflik?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pengalangan dana	√
		(b) Ruang Konsultasi di Media	√
		(c) Informasi/berita positif bagi korban	√
22.	Apakah ada program inovasi dalam pencegahan dan penanganan anak korban Bencana, konflik?	(a) Ya (b) Tidak	

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
	Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Kebijakan	√
		(b) Program spesifik bencana dan konflik	√
		(c) Mekanisme penanganan	√
		(d) Sarana/prasarana	√
		(e) Pengembangan jaringan	√
		(f) Pemanfaatan teknologi	√
23.	Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi yang Terlayani Ukuran: • 100%		
1.	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang anak penyandang disabilitas?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√ √
2.	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang perlindungan anak kelompok minoritas dan terisolasi?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√ √
3.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tentang anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	√ √
4.	Apakah ada sistem pencatatan dan pelaporan anak penyandang disabilitas?	(a) Ya (b) Tidak	√
5.	Apakah tersedia lembaga layanan bagi anak penyandang disabilitas?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, diperuntukan bagi anak penyandang disabilitas apa saja? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Anak disabilitas penglihatan (b) Anak disabilitas pendengaran (c) Intelektual anak disabilitas intelektual (d) Anak disabilitas fisik	√ √ √ √

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
		(e) Anak disabilitas sosial	√
		(f) Anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif	√
		(g) Anak dengan gangguan spektrum autisme	√
		(h) Anak dengan gangguan ganda	√
		(i) Anak lamban belajar	√
		(j) Anak dengan kesulitan belajar khusus	√
		(k) Anak dengan gangguan komunikasi dan wicara	√
		(l) Anak dengan kecerdasan dan bakat istimewa	√
6.	Apakah ada sistem pengasuhan bagi anak penyandang disabilitas?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kontribusi pemerintah daerah? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pendataan dan pemutahiran data (b) Sosialisasi (c) Pelatihan orang tua anak penyandang disabilitas (d) Bantuan keuangan (e) Pelatihan masyarakat/aktivis di lingkungan keberadaan anak penyandang disabilitas (f) Bantuan peralatan/sarana prasarana	√ √ √ √ √ √
7.	Apakah ada akses pendidikan inklusi/khusus bagi anak penyandang disabilitas? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sekolah Inklusi (b) Penyediaan guru pendamping khusus (c) Pelatihan guru pendamping di sekolah inklusi (d) Penyediaan akses KIE (e) Pelatihan keterampilan dan keahlian sesuai minat, bakat dan kemampuan (f) Fasilitasi dan apresiasi atas karya anak disabilitas	√ √ √ √ √ √
8.	Apakah sarana dan prasarana publik telah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas?	(a) Ya (b) Tidak	

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
	Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Transportasi	√
		(b) Fasilitas dan desain bangunan perkantoran pemerintah	√
		(c) Fasilitas dan desain bangunan sekolah	√
		(d) Fasilitas dan desain bangunan publik	√
		(e) Sarana dan prasarana pariwisata	√
9.	Adakah tersedia layanan kesehatan yang ramah anak penyandang disabilitas?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi kespro	√
		(b) Konseling pranikah untuk anak	√
		(c) Jaminan kesehatan	√
		(d) Penyediaan tenaga spesialis disabilitas	√
		(e) Penyediaan alat kesehatan dan obat untuk rehabilitasi medis	√
		(f) Penyediaan alat bantu	√
		(g) Penyediaan rujukan bagi anak penyandang disabilitas korban kekerasan	√
10.	Apakah bentuk pemberian kesempatan, partisipasi dan apresiasi bagi anak penyandang disabilitas? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Melibatkan dalam Forum Anak	√
		(b) Pameran hasil karya anak penyandang disabilitas	√
		(c) Penyediaan beasiswa bagi anak penyandang disabilitas berprestasi	√
		(e) Pelibatan dalam kegiatan kreativitas	√
11.	Apakah ada anak kelompok minoritas dan terisolasi?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apakah hak bagi pengembangan linguistik (bahasa/cara hidup), budaya dan keyakinan bagi kelompok minoritas dan terisolir terjamin? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ada pencatatan kelahiran dan identitas	√
		(b) Ada akses pendidikan	√
		(c) Ada jaminan kesehatan	√
		(d) Kebebasan menikmati budaya, keyakinan dan bahasa	√
		(e) Ada upaya untuk mencegah keterpisahan anak dari orangtua	√
12.	Apakah ada SDM terlatih penanganan anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolir?	(a) Ya	
		(b) Tidak	

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
13.	Jika Ya, apa jenis pelatihannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) KHA	√
		(b) CRPD (Konvensi tentang Hak-hak Orang dengan Disabilitas)	√
		(c) Latihan sensitivitas tentang disabilitas	√
		(d) Sistem Perlindungan Anak (SPA)	√
		(e) Sistem pencatatan dan pelaporan	√
24.a.	Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi Ukuran: • 100%		
1.	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah terkait dengan perlindungan ABH?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√ √
2.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan penanganan kasus dengan proses diversifikasi bagi ABH (khusus pelaku)?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	√ √
3.	Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversifikasi di tingkat penyidikan?	(a) ... kasus dari ... kasus yang diproses	√
		(b) Tidak ada data	
4.	Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversifikasi di tingkat penuntutan?	(a) ... kasus dari ... kasus yang diproses	√
		(b) Tidak ada data	
5.	Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversifikasi di tingkat pengadilan?	(a) ... kasus dari ... kasus yang diproses	√
		(b) Tidak ada data	
6.	Berapa jumlah kasus ABH pasca diversifikasi memperoleh layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial?	(a) ... kasus dari ... kasus yang diproses	√
		(b) Tidak ada data	

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
7.	Berapa jumlah ABH yang mendapatkan bantuan hukum (termasuk untuk anak penyandang disabilitas)?	(a) ... kasus dari ... kasus yang diproses	√
		(b) Tidak ada data	
8.	Apakah ada Polisi di tingkat Polres yang bersertifikasi anak? Jika Ya, berapa jumlahnya?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
		(a) 2 < 10	√
		(b) > 10	√
9.	Apakah ada Jaksa di tingkat Kejaksaan Negeri yang bersertifikasi anak? Jika Ya, berapa jumlahnya?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
		(a) 1 < 3	√
		(b) > 3	√
10.	Apakah ada Hakim di tingkat Pengadilan Negeri yang bersertifikasi anak? Jika Ya, berapa jumlahnya?	(a) Ada	
		(b) Tidak ada	
		(a) 1 < 3	√
		(b) > 3	√
11.	Apakah ada Balai Pemasarakatan?	(a) Ya	√
		(b) Tidak	
12.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam penanganan ABH? Jika Ya, apa bentuk kemitraannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya	
		(b) Tidak	
		(a) LKSA	√
		(b) LPKS	√
		(c) Lembaga keagamaan	√
(d) Ormas	√		
13.	Apakah ada kemitraan dengan media massa dalam penanganan ABH? Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya	
		(b) Tidak	
		(a) Konten responsif anak	√
		(b) Merahasiakan identitas anak	√
		(c) Melakukan kepentingan terbaik bagi anak	√
(d) Memfasilitasi ruang konseling	√		
24.b.	Anak Korban Jaringan Terorisme yang Terlayani Ukuran: • 100%		
1.	Apakah tersedia peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme? Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
		(a) Peraturan Daerah	√
(b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/ Surat Edaran Bupati/Walikota	√		
2.	Apakah ada anak korban jaringan terorisme?	(a) Ya	
		(b) Tidak	

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
	Jika Ya, berapa jumlah anak korban jaringan terorisme? orang	√
3.	Upaya apa yang dilakukan untuk mencegah anak menjadi korban jaringan terorisme?	(a) Memperkuat pendidikan Pancasila (b) Memperkuat rasa cinta tanah air	√ √
4.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat/dunia usaha dalam penanganan anak korban jaringan terorisme?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kemitraannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme (b) Konseling tentang bahaya terorisme (c) Rehabilitasi sosial (d) Pendampingan sosial	√ √ √ √
5.	Apakah ada kemitraan dengan media massa dalam penanganan anak korban jaringan terorisme?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Konten responsif anak (b) Merahasiakan identitas anak (c) Melakukan kepentingan terbaik bagi anak (d) Memfasilitasi ruang konseling	√ √ √ √
24.c.	Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang Terlayani Ukuran: • 100%		
1.	Apakah tersedia peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√ √
2.	Berapa jumlah anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya? anak	√
3.	Dalam kasus-kasus apakah? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Anak dari ibu yang terjebak dalam eksploitasi seksual.....orang (b) Anak dari koruptor.....orang	√ √

No.	INDIKATOR/UKURAN	Jawaban	Lampiran
		(c) Anak dari orang tuanya terinfeksi HIV/AIDS atau jenis penyakit menular lainnya.....orang	√
		(d) Anak yang orangtuanya bekerja sebagai TKI.... orang	√
		(e) Anak dari orang tua diduga terorisorang	√
		(f) Anak yang lahir dari seorang ibu tanpa suami... orang	√
		(g) Anak yang tidak diketahui keberadaan kedua orangtuanya... orang	√
		(h) Anak yang orangtuanya pengguna atau mantan pengguna narkoba...orang	√
		(i) Anak yang orangtuanya mantan pelaku tindak pidana kejahatan...orang	√
4.	Upaya apa yang dilakukan untuk mencegah stigmatisasi? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi	√
		(b) Diskusi	√
		(c) Pertemuan adat	√
5.	Upaya apa yang dilakukan untuk menangani dan merehabilitasi anak korban stigmatisasi?	(a) Pencatatan	√
		(b) Upacara adat	√
6.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam penanganan anak korban stigmatisasi?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kemitraannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi	√
		(b) Pemberian modal usaha untuk keluarga	√
7.	Apakah ada kemitraan dengan media massa dalam penanganan anak korban stigmatisasi?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Konten responsif anak	√
		(b) Merahasiakan identitas anak	√
		(c) Melakukan kepentingan terbaik bagi anak	√
		(d) Memfasilitasi ruang konseling	√

Tabel 4.2
Kegiatan Yang Mendukung Kabupaten Layak Anak Tahun 2017

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3
1	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	407,663,000
2	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	112,437,137,000
3	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	1,178,636,000
5	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	418,178,000
6	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	611,405,000
8	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	68,912,154,000
9	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	24,754,000
10	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	414,502,000
11	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	279,890,000
12	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	325,260,000
13	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	3,040,389,000
14	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANAK BALITA	37,250,000
15	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	1,711,389,000
16	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU	11,468,490,000
17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	10,020,460,000
18	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN UPT DINAS KESEHATAN	7,938,222,000
19	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN BPJS DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA	19,028,932,000
20	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	19,000,000,000
21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	9,041,400,000
22	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	8,367,215,000
23	PROGRAM PERENCANAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR TERUTAMA BAGI MASYARAKAT MISKIN	24,064,097,000

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3
24	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	285,000,000
25	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	546,000,000
26	PROGRAM PENYELENGGARAAN BENCANA DAN PASCA BENCANA	1,258,010,000
27	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	270,021,000
28	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	1,808,800,000
29	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	479,442,000
30	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	1,084,685,000
31	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN PERSAMPAHAN	9,993,239,000
32	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	365,173,000
33	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM	92,422,000
34	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	59,011,000
35	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	4,090,000,000
36	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2,953,789,000
37	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PMKS LAINNYA	249,131,000
38	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	385,827,000
39	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	36,685,000
40	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO	30,318,000
41	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	820,011,000
42	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	2,266,446,000
43	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	191,109,000

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3
44	PROGRAM Penguatan Kelembagaan Pengarus-tamaan Gender dan Anak	165,034,000
45	PROGRAM Keluarga Berencana	1,960,140,000
46	PROGRAM Kesehatan Reproduksi Remaja	13,795,000
47	PROGRAM Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	78,532,000
48	PROGRAM Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	272,489,000
49	PROGRAM Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	108,650,000
50	PROGRAM Pengembangan Nilai Budaya	548,176,000
51	PROGRAM Pengelolaan Kekayaan Budaya	442,182,000
52	PROGRAM Pengelolaan Keragaman Budaya	966,876,000
53	PROGRAM Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	456,829,000
54	PROGRAM Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	879,373,000
55	PROGRAM Pengembangan Destinasi Pariwisata	11,331,732,000
Jumlah		343,216,350,000

NO	INDIKATOR	BASELINE 2017	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2018	2019	2020	2021	
20	Persentase Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes, Puskesmas
21	Peningkatan Persentase Penduduk memiliki Akses Air Minum yang Layak	89,80%	4,16	4,15	0	0	DPU, Desa
21	Persentase Penduduk memiliki Akses Sanitasi yang Layak	95,95%	87	88	89	89	Dinkes, DPU, Desa
V.	KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA						
22	Angka Harapan Lama Sekolah	12,84%	12,85%	12,86%	12,87%	12,88%	Disdikbudpora
23	Rata-rata Lama Sekolah	7,87	7,35	7,36	7,37	7,38	Disdikbudpora
24	Persentase Lembaga Pengasuhan Alternatif yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	Disdikbudpora, Dinas Sosial, Kemenag
25	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (Ha)	530,21	532,25	532,75	533,25	533,75	DPU
VI.	KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS						
26	Persentase Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran yang Terlayani		100%	100%	100%	100%	Dinsos, Dinas P3AKB
27	Persentase Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)		100%	100%	100%	100%	Disnaker
28	Persentase Anak Korban Pornografi, NAPZA dan Terinfeksi HIV/AIDS yang Terlayani		100%	100%	100%	100%	Bagian Kesra, Dinsos, Kesbangpol
29	Persentase Anak Korban Bencana dan Konflik yang Terlayani		100%	100%	100%	100%	Kesbangpol, BPBD, Dinsos
30	Persentase Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi yang Terlayani		100%	100%	100%	100%	Dinsos, Kesbangpol
31	Persentase Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi		100%	100%	100%	100%	Dinas P3AKB, Polres
32	Persentase Anak Korban Jaringan Terorisme yang Terlayani		100%	100%	100%	100%	Kesbangpol, Polres
33	Persentase Anak Korban Stigmatisasi akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang Terlayani		100%	100%	100%	100%	Kesbangpol

BAB V

PENUTUP

Pembangunan sebenarnya ditujukan untuk kesejahteraan manusia, namun tujuan utamanya adalah untuk warisan generasi muda. Untuk itu diperlukan kesinambungan dari berbagai aspek dalam menunjang pembentukan karakter dan kemampuan penerus bangsa sehingga akan lebih baik lagi meneruskan atau bahkan memperbaiki masa depan.

Dunia telah berkomitmen dalam hal perlindungan hal anak, dan Pemerintah Indonesia juga menyikapinya dengan program Kabupaten/Kabupaten, Propinsi atau bahkan menjadi Indonesia layak anak. Dengan menyadari bahwa anak adalah sumber kekayaan tak ternilai, maka Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan ruang yang seluas-luasnya dalam hal pembangunan yang memperhatikan hak-hak anak.

Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak ini semoga mampu memberikan pedoman dalam menentukan prioritas pembangunan yang memenuhi hak anak.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN